

SKRIPSI

**PEMBERDAYAAN PEMULUNG DI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA)
TAMANGAPA ANTANG KOTA MAKASSAR**

MUHAMMAD ALFIAN

Nomor Stambuk : 10561 03901 10



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILLMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2017**

HALAMAN PENGAJUAN

**PEMBERDAYAAN PEMULUNG DI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA)
TAMANGAPA ANTANG KOTA MAKASSAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

MUHAMMAD ALFIAN

No. Stambuk : 10561 3901 10

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2017**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Pemberdayaan Pemulung di Tempat Pengelolaan Akhir
(TPA) Tamangapa Antang Kota Makassar**
Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD ALFIAN**
NIM : 10561 03901 10
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

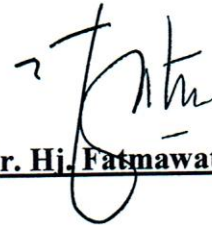
Menyetujui :

Pembimbing I



Dra. Hj. Muhajirah Hasanuddin, M.Si.

Pembimbing II



Dr. Hj. Fatmawati, M.Si.

Mengetahui

Dekan

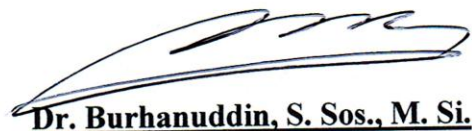
Fisip Unismuh Makassar



Dr. H. Saiful Molla, M.M.

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara



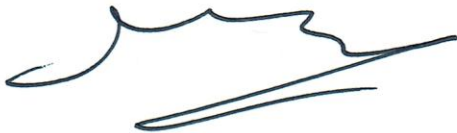
Dr. Burhanuddin, S. Sos., M. Si.

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1150/FSP/A.1-VIII/VIII/38/2017 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.I) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari jum'at tanggal 24 bulan Agustus tahun 2017.

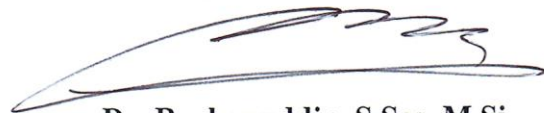
TIM PENILAI

Ketua,



Ir. H. Saleh Mollah, MM





Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji:

1. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si
2. Dra.Hj.Muhajirah Hasanuddin, M.Si
3. Drs. Ruskin Azikin
4. Drs. A. Ansyari Mone, M.Pd

()
()
()
()

ABSTRAK

Muhammad alfian, 2017. Pemberdayaan Pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa Antang Kota Makassar (Pebimbing Muhajirah Hasanuddin dan Fatmawati).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemberdayaan Pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa Antang Kota Makassar yang dapat di ketahui dengan menggunakan 2 aspek yaitu pembinaan secara individual atau terhadap SDM Pemulung dan pengembangan ekonomi atau sumber pendapatan pemulung di TPA Tamangapa

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yakni penelitian yang mengkaji objek dan mengungkap fenomena-fenomena yang ada secara kontekstual melalui data yang di peroleh. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yakni menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis dan selanjutnya ditampilkan dalam bentuk kalimat sesuai dengan hasil wawancara dari 7 orang Informan yang telah ditentukan sebelumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberdayaan Pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di *Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PEMBERDAYAAN PEMULUNG DI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) TAMANGAPA ANTANG KOTA MAKASSAR”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta Syahril Ardiansyah dan Sitti safiah. Atas segala bimbingan, kasih sayang yang tulus, jasa dan pengorbanan sehingga skripsi ini bisa saya kerjakan dengan baik. Penghargaan, simpuh, dan sujud serta doa cinta terkirim semoga Allah SWT senantiasa memberikan umur panjang, nikmat iman serta perlindungan-nya, allahuma Amin.

Ucapan yang sama juga saya sampaikan kepada dosen pembimbing ibu Dra. Hj. Muhajirah Hasanuddin, M.si selaku pembimbing I dan ibu Dr. Hj. Fatmawati, M.Si selaku Pembimbing II, yang dengan tulus membimbing penulis melakukan dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak dari awal sampai selesai skripsi ini. Teriring doa Allah SWT menggolongkan upaya-upaya beliau sebagai tabungan amal kebaikan.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis juga tak lupa mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman, SE. MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan para pembantu Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Burhanuddin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak Dr. H. Mappamiring, M.Si selaku Penasehat Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan dilembaga ini.
6. Segenap Staf tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah memberikan pelayanan administrasi dan bantuan kepada penulis dengan baik.
7. Bapak H. Arifuddin. S.Sos Selaku Kepala Kelurahan Tamangapa dan Bapak Sakka Saleh, S.Sos Selaku kepala UPTD Tamangapa beserta jajarannya yang telah kooperatif kepada penulis yang melakukan penelitian Kelurahan Tamangapa.
8. Ibu Rosnawati, selaku Ketua Forum Masyarakat terpinggirkan beserta pemulung TPA Tamangapa yang telah banyak membantu penulis selama penelitian.

9. Buat teman-teman seperjuangan khususnya angkatan 2010 kelas G yaitu Rezki, Lukman, Fandy, Alam, Anto Tahir, Diwan, Sul, Amry, Wandy, Iksar, Askar, Riri', Andy, Maskur, Wawan, Risal, Ahmad ,Fhira, Itha, Handa, Nhina', Enhy, Desi, Murni', Asmi', Ayu Pagar, Rahayu, Ayu Suratma, Ibe', Fitto', Liya, Sumi',Dan Ekhi'. Terima kasih banyak atas semua yang telah kalian berikan. Suka dan duka kita telah lewati bersama. "SALAM SUKSES".
10. Buat sahabat-sahabatku yang tidak bisa disebut satu persatu, terima kasih atas semua bantuannya baik berupa materi, pengorbanan maupun doa yang kalian panjatkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, November 2016



Muhammad Alfian

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman pengajuan.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Tim Penguji	iv
Halaman Pernyataan keaslian karya ilmiah	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii-ix
Daftar Isi	x-xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Konsep dan Teori	6
B. Kerangka Pikir.....	35
C. Fokus Penelitian	37
D. Deskripsi fokus penelitian.....	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	40
B. Jenis Dan Tipe Penelitian	40
C. Sumber Data	41

D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
Deskripsi obyek penelitian.....	46
Proses Pemberdayaan Relawan terhadap Pemulung di TPA Tamangapa	49
Faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan sampah di TPA tamangapa Kota Makassar	62
Hasil Pemberdayaan pemulung.....	78
Pembahasan.....	78
BAB V PENUTUP	
Kesimpulan	84
Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia dengan lingkungan hidup mempunyai hubungan yang sangat erat. Hubungan ini sangat tergantung dan dipengaruhi oleh pandangan manusia terhadap lingkungan hidup. Masalah pemberdayaan berkaitan erat dengan sosial dan lingkungannya. Pemberdayaan merupakan salah satu wujud nyata dari program kesenjangan sosial di setiap daerah mulai dari ibu kota sampai kabupaten. Permasalahan sosial yang di kaitan dengan pemulung yang berada di kota Makassar senantiasa semakin sangat memperhatikan yang di akibat kurang perhatian dari pemerintah dalam melihat kondisi di lapangan secara langsung sehingga mengakibatkan turunnya kualitas hidup masyarakat pemulung.

Permasalahan Pemulung merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di daerah perkotaan (kota-kota besar). Salah satu faktor dominan yang mempengaruhi perkembangan masalah Pemulung adalah kemiskinan, dimana kemiskinan ini berdampak negatif terhadap meningkatnya arus urbanisasi dari daerah pedesaan ke kota-kota besar, sehingga terjadi kepadatan penduduk dan daerah kumuh yang menjadi pemukiman para urban tersebut. Disamping itu, sulit dan terbatasnya pengetahuan dan keterampilan menyebabkan banyak diantaranya yang mencari nafkah untuk mempertahankan hidup dengan terpaksa menjadi pemulung. Dilihat dari aspek kesejahteraan sosial, kondisi

kehidupan sehari-hari pemulung sangat memprihatinkan. Pola kehidupan mereka di wilayah perkotaan cenderung kumuh dan mengelompok di kantong-kantong kemiskinan. Mereka banyak tinggal di tempat-tempat yang beresiko tinggi seperti di kolong jembatan, pinggir kali, lokasi pembuangan sampah, atau bahkan ada yang tidur di gerobak sampah bersama anak dan istrinya. Hidupnya menggelandang ke berbagai tempat dengan penghasilan yang tidak menentu, mereka memiliki tingkat pendidikan rendah dan keterampilan (skills) yang kurang memadai, serta minim pengalaman bekerja.

Aspek kesehatan, pekerjaan ini memiliki resiko besar karena rentan terkena penyakit ditambah lagi kadar gizi yang rendah serta akses pelayanan kesehatan yang minim. Banyak keluhan bahkan cemoohan dari warga atas keberadaan pemulung karena kehadirannya sudah menimbulkan “keresahan” dan ketidaktenteraman masyarakat. Kondisi tersebut tidak terlepas dari sebagian pemulung yang sering melakukan tindakan kurang terpuji, seperti mengambil perkakas rumah tangga atau barang-barang yang masih dipakai pemiliknya. Selain itu tempat-tempat penampungan barang milik pemulung menambah kekumuhan wajah kota karena para pemulung cenderung tidak memperhatikan aspek kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan.

Tujuan sampai saat ini sampah masih saja belum dapat ditanggulangi secara maksimal. Sampah masih sering menjadi hal yang menurut kebanyakan masyarakat sebagai suatu masalah. Tidak hanya dipusat kota bahkan disudut kota yang menjadi lahan pembuangan sampah juga masih menyimpan beragam masalah kehidupan yang rentan dialami masyarakat terpinggirkan.

TPA Antang adalah salah satu realita kehidupan yang tidak banyak orang menegok kedalamnya. Tempat pembuangan sampah kota Makassar ini menjadi titik akhir dari semua truk pengangkut sampah yang ada dipusat kerumunan kota. Sehingga, TPA antang menjadi pusat timbunan sampah yang mungkin menghabiskan bertahun-tahun untuk mengelola semua sampah yang terkumpul. TPA Antang selain sebagai lahan menampung sampah, juga merupakan lahan mengais rejeki utuk mereka yang bermukim di dalamnya. Tidak sedikit yang bergantung pada profesi sebagai pengumpul sampah. Mulai dari seorang kepala keluarga sampai anak dan istri mereka.

Pemberdayaan pemulung yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang terjadi sekarang ini yaitu salah satunya kurangnya perhatian pemerintah kota terhadap masyarakat pemulung di TPA Antang. Sesuai informasi yang di dapatkan dari ibu Naharia sebagai Ketua komunitas pemulung yang bernama FORMAT (Forum Masyarakat Terpinggirkan). Menurut beliau sebelum terbentuknya forum ini ada lembaga yang lebih dahulu yang peduli terhadap nasib kaum pemulung yang bernama YAPTA-U (Yayasan Pabatta Ummi) yang berdiri pada tahun 1994 satu tahun setelah diresmikan TPA antang. dari lembaga ini ada sebagian pemulung yang mulai tersadar bahwa ada hal yang bisa lakukan selain memulung untuk memperbaiki nasib yaitu ibu Naharia yang berhasil merubah nasibnya jauh lebih dari sebelumnya sehingga beliau mulai melakukan lanjutan kegiatan yang pernah dilakukan oleh lembaga YAPTAHU.

Berdasarkan dari narasumber yang di dapat oleh penulis komunitas pemulung ini mempunyai program kerja yang dimiliki yaitu melakukan pembinaan kepada warga pemulung supaya mereka mempunyai keterampilan seperti beliau. Tetapi kendala yang di hadapi dari pembinaan atau pelatihan oleh masyarakat pemulung yaitu kurangnya partisipasi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan tersebut karna pemerintah dari dinas sosial maupun pemerintah kota mereka hanya menjalankan program yang mereka buat tanpa ada tindak lanjutan dengan menyediakan pemateri dan juga hanya sebagian pemulung yang ingin ikut berpartisipasi dalam proses pelatihan keterampilan

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik mengkaji dan mengetahui koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar dalam rangka Pemberdayaan pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang, Kota Makassar. Maka penulis mengangkat masalah ini sebagai suatu kajian yang diberi judul **“Pemberdayaan Pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa Antang Kota Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana proses pemberdayaan pemulung di TPA Tamangapa Kota Makassar ?
2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pemberdayaan pemulung dalam pengelolaan sampah di TPA Tamangapa ?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak pada uraian masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pemberdayaan pemulung di TPA Tamangapa Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat proses pemberdayaan pemulung dalam pengelolaan sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil peneltian ini diharapkan dapat memberikan sebangsih pemikiran baik bagi kepentingan dunia akedemik maupun terhadap dunia praktik. Adapun manfaatnya sebagai berikut :

1. Manfaat terhadap kepentingan akademik

Mengetahui pemberdayaan pemulung di Kota Makassar dan dapat memperkaya pengetahuan teori tentang pemerintahan dalam mengatasi masalah pemulung.

2. Manfaat terhadap praktik

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan penulis terkhusus pada gambaran tentang pemberdayaan pemulung di Kota Makassar dan bisa menjadi salah satu bahan masukan yang berguna bagi aparat yang terlibat dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh negara sebagai usaha untuk lebih meningkatkan kinerja ke depan terutama dalam pemberdayaan pemulung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *empowerment* dalam bahasa Inggris.

Pemberdayaan sebagai terjemahan dari *empowerment* menurut Merriam Webster (2000:1) dalam *Oxford English Dictionary* mengandung dua pengertian :

- a. *To give ability or enable to*, yang diterjemahkan sebagai member kecakapan/kemampuan atau memungkinkan
- b. *To give power of authority to*, yang berarti member kekuasaan.

Dalam konteks pembangunan istilah pemberdayaan pada dasarnya bukanlah istilah baru melainkan sudah sering dilontarkan semenjak adanya kesadaran bahwa faktor manusia memegang peran penting dalam pembangunan.

2. Pengelolaan Pemberdayaan.

Pengelolaan pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. konsep ini

mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*. Gagasan pembangunan yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat perlu untuk dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat. perubahan struktur yang sangat diharapkan adalah proses yang berlangsung secara alamiah, yaitu yang menghasilkan dan harus dapat dinikmati bersama. begitu pula sebaliknya, yang menikmati haruslah yang menghasilkan.

Proses ini diarahkan agar setiap upaya pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kapasitas masyarakat (*capacity building*) melalui penciptaan akumulasi modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan, yang mana pada giliran nanti dapat pula menciptakan pendapatan yang akhirnya di nikmati oleh seluruh rakyat. Dan proses transportasi ini harus dapat digerakkan sendiri oleh masyarakat.

3. Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan upaya pembangunan kemampuan masyarakat dan memberdayakan sumber daya manusia (SDM) yang ada melalui pengembangan kelembagaan, sarana, dan Prasaranaserta pengembangan tiga-P (pendampingan, penyuluhan dan pelayanan). Pendamping yang dapat menggerakkan partisipasi total masyarakat, penyuluhan dapat merespon dan memantau ubahan-ubahan yang terjadi di masyarakat, pelayanan yang berfungsi sebagai unsur pengendali ketepatan distribusi aset sumber daya fisik dan nonfisik yang diperlukan masyarakat.

Pemberdayaan sebagai perluasan aset dan kemampuan masyarakat miskin dalam menegosiasikan dengan, memengaruhi, mengontrol, dan mengendalikan tanggungjawab lembaga-lembaga yang memengaruhi kehidupannya. Masalah pembangunan merupakan masalah yang kompleks. Kompleksitas itu misalnya dari sisi manajemen berarti perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dari sisi bidang yang harus dibangun juga memiliki aspek kehidupan yang sangat luas. Aspek kehidupan itu mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan.

Dalam manajemen pemerintahan yang otoriter yang sentralistis, dalam realitas masyarakat lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan. Ketika kini pemerintahan yang demokratis yang hendak dikembangkan, maka ada perubahan posisi masyarakat yang semula lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan menjadi subyek pembangunan. Memosisikan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan agar bersifat efektif perlu dicarikan berbagai alternatif strategi pemberdayaan masyarakat. Pilihan strategi yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan / kesenjangan / ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan

transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal/tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan kultural (Sunyoto Usman, 2004).

Bagaimana strategi atau kegiatan yang dapat diupayakan untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat ?. Ada beberapa strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat. Strategi 1 : Menciptakan iklim, memperkuat daya, dan melindungi. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu ;

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana

dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga – lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidakselalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerjakeras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat didalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya .Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pementapan, pembudayaan, pengamalandemokrasi.

3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat.

Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan menderikan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Vidhyandika (2011) menjelaskan bahwa "proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog". Sumardjo (1999) menyebutkan ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu:

1. Mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan)
2. Mampu mengarahkan dirinya sendiri
3. Memiliki kekuatan untuk berunding
4. Memiliki *bargaining power* yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, dan
5. Bertanggungjawab atas tindakannya.

Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat.

Kondisi afektif adalah merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

4. Proses Pemberdayaan

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui beberapa kegiatan : pertama, menciptakan susasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*Enabling*). Kedua,

memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Ketiga. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Di sinilah letak titik tolak yaitu bahwa engenalannya setiap manusia, setiap anggota masyarakat, memiliki suatu potensi yang selalu dapat terus dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak berdaya, karena kalau demikian akan mudah punah. Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang harus diikuti dengan tetap memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Dalam rangka itu pula diperlukan langkah-langkah yang lebih positif selain dari menciptakan iklim dan suasana. Memperkuat potensi ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input) serta membuka akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang nantinya dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya.

Dalam era CHAFTA atau perjanjian pemerintah tidak bisa dihindari dalam menghadapi persaingan bukannya dengan bangsa luar, tetapi juga dengan masyarakat sendiri. Saat ini saja sudah kelihatan masyarakat lebih memilih untuk membeli produk luar yang menurutnya lebih baik dengan harga yang relatif sama bahkan lebih murah dan terlebih lagi membelinya merasa lebih bergengsi. Bila keadaan ini terus demikian bisa jadi produk bangsa sendiri tidak laku di dalam negeri. Mungkin ada sesuatu dengan pemberdayaan masyarakat. Bagaimana menyikapi pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi perubahan dunia yang begitu cepat.

Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga tercipta lingkungan yang membuat masyarakat dapat menikmati kualitas hidup lebih baik, aman, serta memperluas masyarakat untuk memilih bagi peningkatan harga diri (Dadang Solihin, 2011). Tujuan pemberdayaan adalah :

1. Peningkatan standar hidup
2. Meningkatkan percaya diri
3. Peningkatan kebebasan setiap orang

Menurut Hidayat, S. 2001. Konsep *Community Based Development* (CBD) yang banyak digunakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan '*empowering*' masyarakat dengan memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya. CBD berfokus pada masalah dari masyarakat itu sendiri.

Ada 3 karakter utama dari CBD yaitu :

- 1) CBD berbasis sumber daya masyarakat,
- 2) CBD berbasis partisipasi masyarakat dan
- 3) CBD berkelanjutan.

Ada 5 prinsip dasar CBD , yaitu :

1. CBD memerlukan *break even* dalam setiap kegiatan yang dikelola.
Dalam hal ini dimaksudkan keuntungan yang diperoleh harus dapat

didistribusikan kembali pada masyarakat dalam bentuk program atau kegiatan pembangunan yang lainnya.

2. CBD melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan.
3. Antara pelatihan dan pembangunan fisik dan pengembangan usaha menjadi satu kesatuan
4. Dalam mengimplementasikan CBD harus dapat memaksimalkan dana baik dari pemerintah, swasta dan sumber-sumber donasi lainnya.
5. CBD organisasi harus memfungsikan diri sebagai katalisator.

Program CBD harus mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, lingkungan dan spiritual. Pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan sejak awal kemerdekaan organisasi sosial dan keagamaan serta LSM dan berlanjut pada orde baru hingga era reformasi, hasilnya belum maksimal masih banyak mengalami kendala, terkesan belum siap menghadapi tantangan dan peluang dari era Chafta. Beberapa kelemahan dari pemberdayaan masyarakat yang dapat dikumpulkan adalah sbb :

Kegiatan pemberdayaan rakyat selama ini ditunjukkan pada masyarakat lokal dan berfokus pada *society problems* (Edy Suharto, 2011). Padahal masalahnya tidak sebatas itu saja, akan tetapi menjangkau baik aspek mikro dan makro. Dengan pemberdayaan masyarakat bisa terwujud kemampuan dari diri sendiri dan dari luar untuk memiliki bargaining power.

1. Ketergantungan pada sumber dana dari luar. Penerapan pemberdayaan masyarakat dengan konsep CBD mengandalkan dana dari luar (bantuan pemerintah, asing).
2. Struktur perekonomian yang berat sebelah diatas dan rapuh di bawah. Hal itu terjadi karena kurang seimbangya perhatian yang diberikan pemerintah Indonesia sejak awal sampai kini pada pengembangan ekonomi kelompok-kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah dibandingkan dengan kelompok-kelompok usaha besar.

Pemberdayaan masyarakat dalam era globalisasi melibatkan segenap pihak dan dukungan kebijakan dari atas yang mendukung pertumbuhan dari bawah. Di sektor perdagangan seperti yang dilakukan walikota Solo, Joko Widodo yang juga berjiwa enterpreneur itu; beliau mengembangkan pasar tradisional yang di dukung dengan kebijakan yang kondusif yang memudahkan pelaku ekonomi kreatif dan tidak menerima pasar modern masuk ke wilayahnya. Dalam kegiatan itu ia tidak menggunakan dana bantuan (asing), akan tetapi menggunakan potensi wilayahnya dan percaya pada kekuatan sendiri.

Strategi pemberdayaan masyarakat lainnya adalah dengan melakukan *green technopreneurship* seperti pengembangan *kampoengsmart* di dusun Rejosari, kabupaten Sragen. Pola pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan adalah yang menjunjung tinggi aspirasi dan potensi masyarakat untuk melakukan kegiatan swadaya, yaitu pola pemberdayaan yang sifatnya bottom-up intervention yang menghargai dan

mengakui bahwa masyarakat lapisan bawah memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhannya, memecahkan permasalahannya, serta mampu melakukan usaha-usaha produktif dengan prinsip swadaya dan kebersamaan.

Strategi pemberdayaan masyarakat dikemukakan oleh Sovia Emmy (2004) yang utamanya pada kualitas SDM. Pendidikan masyarakat harus ditingkatkan dalam membangkitkan kesadaran akan nasionalisme untuk mulai perubahan dari diri sendiri, dari hal yang kecil dan dilakukan mulai dari sekarang. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan proses pemberdayaan, itu :

1. Konsep pemberdayaan hendaknya dapat dipahami oleh pemimpin.
2. Terdapat perubahan budaya (culture change), baik pada budaya organisasi dan perusahaan,
3. Pemimpin harus memiliki kesadaran dalam dirinya, bahwa dalam implementasi dari konsep-konsep pemberdayaan, pada akhirnya akan terjadi perubahan peran (role change), yang berimbas pada berkurangnya peran mereka.
4. Masyarakat harus siap merubah dirinya dan menghilangkan hambatan mental yang ada dalam diri mereka.
5. Proses pemberdayaan membutuhkan waktu dan energi dalam pendekatannya, karena bertujuan menangkap pikiran dan hati orang.

Dalam pemberdayaan rakyat harus kompak dan adanya arahan yang jelas dari pimpinan, ke mana dan bagaimana untuk mengatasi ini,

serta jangan terlalu mudah mengadakan perubahan yang bersifat prinsip. Karena itu, diperlukan pemimpin yang tidak saja populis namun memiliki kemampuan baik sebagai leader maupun manajer.

Pemberdayaan di era global membutuhkan kekuatan moral baik dari pemimpin maupun masyarakat. Diperlukan keseimbangan dalam aspek-aspek wawasan global, kebangsaan, keagamaan dan kemanusiaan. Serta perubahan culture set dari konsumtif ke produktif.

Menurut Gumbira Sa'id (2011) ada 9 elemen kunci keefisiensi yang dapat meningkatkan daya saing global diantaranya :

1. Aspek-aspek kepemimpinan (*leadership*),
2. Kemampuan untuk meninjau ke depan (*foresight*),
3. Budaya perusahaan atau bisnis yang mendukung (*corporate culture*),
4. Teknik manajemen (*management tools*),
5. Daur hidup manajemen (*life cycle management*),
6. Riset dan pengembangan,
7. Proses produksi dan operasi,
8. Aspek pemasaran, serta layanan purna jual
9. Pemanfaatan kembali limbah.

Berdasarkan teori diatas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam meningkatkan sumber daya manusia sangat diperlukan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan yang dapat mencakup seluruh elemen yang diatas sehingga apa yang di inginkan oleh masyarakat dan bangsa sudah terpenuhi

tampa adanya campur tangan Negara asing yang dapat mengakibat terkurasnya sumber Negara sendiri.

5. Pengelolaan Pemberdayaan

Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat mampu bertahan (*survive*) dan (dalam pengertian yang dinamis) mampu mengembangkan diri untuk mencapai tujuan-tujuannya. Karena itu, memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk (terus menerus) me-ningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat “bawah” yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan masyarakat adalah mening-katkan kemampuan dan meningkatkan kemandirian masyara-kat.

Sejalan dengan itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin) untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengendali-kan kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung-gugat (*accountable*) demi perbaikan kehidupannya.

Empowerment atau pemberdayaan secara singkat dapat diartikan sebagai upaya untuk memberiikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*). Karena itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses terencana guna meningkatkan skala/*upgrade* utilitas dari obyek yang diberdayakan.

Dasar pemikiran suatu obyek atau target group perlu diberdayakan karena obyek tersebut mempunyai keterbatasan, ketidakberdayaan, keterbelakangan dan kebodohan dari berbagai aspek. Oleh karenanya guna meng-upayakan kesetaraan serta untuk mengurangi kesenjangan diperlukan upaya merevitalisasi untuk mengoptimalkan utilitas melalui penambahan nilai. Penambahan nilai ini dapat mencakup pada ruang bidang aspek sosial, ekonomi, kesehatan, politik dan budaya.

Menurut Jim Ife & Frank Tegoriero (2008), setidaknya ada enam dimensi pengembangan atau pemberdayaan masyarakat dan kesemuanya berinteraksi satu dengan lainnya dalam bentuk-bentuk yang kompleks. Keenam dimensi tersebut yaitu:

1. Pengembangan sosial
2. Pengembangan ekonomi
3. Pengembangan politik
4. Pengembangan budaya
5. Pengembangan lingkungan
6. Pengembangan personal/ spiritual

Beberapa dimensi lebih fundamental daripada lainnya; misalnya banyak orang (khususnya orang-orang pribumi) akan beranggapan bahwa pengembangan personal/spiritual merupakan landasan untuk semua pengembangan yang lain. Tetapi untuk tujuan penyusunan model pengembangan masyarakat dan model pemikiran tentang peran pekerja masyarakat, keenam dimensi di atas dipertimbangkan sebagai hal yang

sangat penting. Dalam situasi tertentu, tidak semua dimensi ini akan memiliki prioritas yang setara.

Masyarakat mana pun akan mengembangkan keenam dimensi tersebut untuk level-level yang berbeda; misalnya, satu masyarakat mungkin memiliki basis ekonomi yang kuat, partisipasi politik yang sehat dan identitas budaya yang kuat, tapi sekaligus memiliki pelayanan kemanusiaan yang kurang baik, lingkungan fisik yang buruk, harga diri yang rendah dan tingkat pengasingan yang tinggi. Dalam masyarakat yang demikian, pengembangan lingkungan dan personal/spiritual akan menjadi prioritas tertinggi dalam program pengembangan masyarakat.

Namun begitu, masyarakat lainnya akan mencerminkan gambaran yang berbeda dan memerlukan prioritas yang berbeda dalam proses pengembangan. Poin penting yaitu bahwa keenam aspek pengembangan masyarakat tersebut sangat penting dan untuk memiliki masyarakat yang benar-benar sehat dan berfungsi, perlu mencapai level pengembangan yang tinggi untuk keenam dimensi secara keseluruhan. Pekerja masyarakat manapun atau siapa pun yang terkait dengan program pengembangan masyarakat harus memperhatikan keenam dimensi itu dan tujuan tersebut harus memaksimalkan pengembangan pada seluruh dimensi itu.

Edi Suharto (2008) mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan: Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar,

fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.

Kemampuan membeli komoditas ‘kecil’: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, sampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.

Kemampuan membeli komoditas ‘besar’: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator di atas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ditenak, memperoleh kredit usaha.

Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar

rumah. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.

Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya, terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

Berbagai definisi, dimensi, indikator dan karakteristik kemiskinan diperoleh gambaran bahwa untuk menanggulangi kemiskinan dan memberdayakan masyarakat diperlukan program pemberdayaan yang tepat. Suatu program pemberdayaan tidak dapat digeneralisir untuk mengatasi masalah kemiskinan di semua komunitas yang memiliki karakteristik berbeda.

Untuk memilih program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka perlu untuk lebih dulu memahami pengertian dan jenis-jenis pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, kosa kata, pengetahuan dan

keterampilan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menentukan masa depan mereka sendiri dan untuk berpartisipasi serta mempengaruhi kehidupan masyarakatnya”. Dari definisi ini terlihat jelas bahwa pemberdayaan bukan sekedar menolong orang miskin agar menjadi tidak miskin. Pengertian pemberdayaan menurut Ife dan Tesoriero lebih diarahkan kepada peningkatan kemampuan masyarakat untuk mandiri, dapat mengendalikan masa depannya dan bahkan dapat mempengaruhi orang lain.

Sardlow dan Adi (2008) mengatakan bahwa “pada intinya pengertian pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka”. Adi (2008) mengatakan bahwa “tujuan dan target pemberdayaan bisa saja berbeda, misalnya di bidang ekonomi, pendidikan atau kesehatan”. Pemberdayaan juga bisa bervariasi dalam pembangunan sehingga pemberdayaan di suatu bidang bisa berbeda dengan bidang lainnya.

Pengertian dan indikator-indikator tersebut, pemberdayaan dalam perspektif pekerjaan sosial mempunyai tingkatan-tingkatan, yaitu:

- 1) dari tidak berdaya menjadi berdaya,
- 2) setelah berdaya kemudian menguat dan
- 3) setelah menguat lalu dikembangkan.

Pekerjaan sosial dalam upaya pemberdayaan tidak berhenti pada pencapaian kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari tetapi lebih pada peningkatan kapasitas individu tersebut agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Bank Dunia (2002) mengartikan pemberdayaan sebagai *“Empowerment is the expansion of assets and capabilities of poor people to participate in, negotiate with, influence, control, and hold accountable institutions that affect their lives”*.

Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) tahun 2007 mengatakan bahwa “pemberdayaan dianggap komprehensif apabila menampilkan lima karakteristik, yaitu:

- a. berbasis lokal,
- b. berorientasi pada peningkatan kesejahteraan,
- c. berbasis kemitraan,
- d. bersifat holistik dan
- e. berkelanjutan

Pengertian mengenai pemberdayaan tersebut menunjukkan bahwa pada prinsipnya pemberdayaan bukan merupakan suatu program atau kegiatan yang berdiri sendiri. Pemberdayaan merujuk pada serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk merubah lebih dari satu aspek pada diri dan kehidupan seseorang atau sekelompok orang agar mampu melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk membuat kehidupannya lebih baik dan sejahtera.

Berkaitan dengan upaya pengembangan modal sosial dalam pemberdayaan komunitas di RW 012, Pandangan konseptual pemberdayaan mempunyai kecenderungan untuk dilakukannya suatu proses pemberian kemampuan agar selanjutnya komunitas dapat mengatasi masalah sendiri. Pengertian ini sejalan dengan prinsip pekerjaan sosial yang menolong klien agar klien dapat menolong dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam proses penelitian dan implementasi model intervensi ada tahap-tahap perencanaan kegiatan yang tidak bisa dilakukan secara partisipatif bersama komunitas.

Beberapa kegiatan dalam pengembangan modal sosial dalam pemberdayaan komunitas memerlukan perencanaan dan intervensi dari pihak luar. Meskipun demikian, model intervensi dan rencana kegiatan hanya bisa diterapkan apabila komunitas menerima dan menyepakati hasil analisis terhadap masalah yang dihadapinya serta bersedia berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan yang akan dilaksanakan.

Pengertian pemberdayaan menurut Payne (2002:266) mempunyai kecenderungan yang menunjukkan proses pemberdayaan dengan memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan dari lingkungan kepada individu agar mempunyai kemampuan untuk menentukan pilihan hidupnya. Intervensi dilakukan untuk mendorong dan mengarahkan komunitas dalam proses transformasi yang memungkinkan warga mengontrol kehidupannya dan menentukan sendiri masa depannya. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa di satu sisi : kehidupan, nilai dan

norma dalam komunitas telah dan akan selalu dipengaruhi oleh tindakan, kebijakan maupun dampak yang datang dari luar.

Di sisi lain, komunitas banyak tertinggal pada beberapa aspek karena ada budaya, nilai-nilai dan norma sosial yang mereka pertahankan tidak memberi peluang untuk mencapai kondisi kehidupan yang lebih baik. Di samping pengertian-pengertian mengenai pemberdayaan yang dikemukakan oleh para ahli, konsep mengenai pemberdayaan yang dapat dijadikan referensi dan perbandingan dalam menyusun rencana intervensi bagi komunitas.

Konsep yang dikemukakan oleh lembaga swadaya masyarakat ini sejalan dengan pemikiran peneliti yang prihatin dengan terjadinya penurunan kualitas sumber daya manusia dan modal sosial dalam masyarakat karena dampak negatif pemberian bantuan. Disadari atau tidak, proyek-proyek pemberian bantuan secara tidak langsung telah menciptakan pola mengemis gaya baru dalam masyarakat, yaitu dengan cara membuat proposal permohonan bantuan dan mengirimkannya ke berbagai instansi. Permohonan bantuan ini tidak lagi terbatas pada kebutuhan-kebutuhan urgen dan membutuhkan biaya sangat besar yang tidak mampu disediakan oleh masyarakat seperti pengairan/irigasi atau listrik masuk desa.

Tingginya harapan masyarakat terhadap bantuan sudah meluas sampai ke hal-hal yang sesungguhnya dapat dilakukan secara swadaya oleh masyarakat itu sendiri, seperti perayaan hari-hari Nasional atau kerja

bakti bulanan di tingkat lokal. Lemahnya daya juang masyarakat juga disebabkan oleh dampak negatif proyek-proyek pemerintah yang dilaksanakan oleh pihak ketiga (kontraktor). Proyek-proyek seperti ini menempatkan posisi masyarakat sebagai penonton sehingga menjadi terbiasa untuk menunggu bantuan dan kurang merasa memiliki terhadap bantuan yang diberikan.

6. Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Suatu Proses

Adi (2008) mengatakan bahwa “pemberdayaan dapat dilihat sebagai suatu program maupun sebagai suatu proses”. Pemberdayaan disebut program bila dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan membutuhkan jangka waktu tertentu untuk pencapaiannya. Pemberdayaan dipandang sebagai proses apabila pemberdayaan itu terus berjalan sepanjang usia manusia dan tidak berhenti di suatu masa. Demikian pula halnya dalam masyarakat, proses pemberdayaan akan terus berjalan selama komunitas itu tetap ada dan tetap mau memberdayakan diri mereka sendiri.

Menurut Hogan dalam Adi (2008), proses pemberdayaan yang berkesinambungan memiliki siklus yang terdiri dari lima tahapan utama, yaitu :

- a. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan (*recall depowering/empowering experiences*);
- b. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan penidakberdayaan (*discuss reasons for depowerment/ empowerment*);

- c. Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek (*identify one problem or project*);
- d. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan (*identify useful power bases*); dan
- e. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya (*develop and implement action plans*).

Tahapan tersebut tidak merupakan suatu kegiatan yang berhenti pada tahap mengembangkan rencana-rencana aksi dan implementasinya namun merupakan proses yang terus menerus sehingga membentuk siklus yang berkesinambungan. Pendapat Adi mengenai pemberdayaan dalam suatu program yang terpadu bertolak belakang dengan apa yang dikemukakan oleh Ife dan Tesoriero. Berkaitan dengan pengembangan masyarakat yang terpadu.

Ife dan Tesoriero (2008) mengemukakan bahwa pengembangan masyarakat satu dimensi sudah pasti akan gagal karena didasarkan pada pemikiran linear bukan mengambil pendekatan holistik yang didasarkan pada perspektif ekologis. Dengan memusatkan pada satu dimensi, pengembangan akan mengabaikan kekayaan dan kompleksitas kehidupan manusia dan pengalaman masyarakat.

Pendapat Ife dan Tesoriero terlihat jelas bahwa pengembangan masyarakat secara terpadu mutlak harus dilakukan. Tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa berbagai tindakan untuk memberdayakan masyarakat tidak bisa disinergiskan. Namun pengertian terpadu tidak berarti semua

jenis kegiatan pemberdayaan dilakukan secara serentak. Pengembangan masyarakat secara terpadu dapat digambarkan sebagai serangkaian kegiatan pemberdayaan yang dilakukan secara sistematis dan saling melengkapi.

Pemberdayaan bukanlah program yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu singkat atau bersifat temporer. Pemberdayaan harus dilaksanakan secara berkesinambungan dengan terus mengembangkan jenis-jenis kegiatan yang paling tepat untuk komunitas. Meskipun telaahan mengenai program pemberdayaan banyak mengemukakan kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan program dan ketidakberhasilan kelompok sasaran untuk mencapai tujuan namun harus diakui juga bahwa ada banyak program pemberdayaan yang berhasil dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Program pemberdayaan yang kurang berhasil atau gagal mencapai tujuan tentu disebabkan oleh berbagai kendala. Adi (2008) mengemukakan bahwa “salah satu kendala yang menyebabkan program pemberdayaan tidak berjalan mulus dalam pelaksanaannya adalah adanya kelompok-kelompok dalam komunitas yang menolak upaya pembaruan atau perubahan yang terjadi”.

Menurut Watson dalam Adi (2008), “kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program pemberdayaan dapat berasal dari kepribadian individu dalam komunitas dan bisa juga berasal dari sistem sosial”. Kendala-kendala tersebut adalah :

a. Kendala yang berasal dari kepribadian individu

a. Kestabilan (*homeostasis*)

Tubuh manusia mempunyai kestabilan yang terbentuk dalam jangka waktu cukup panjang. Stimulus yang diberikan secara terus menerus untuk mengubah kestabilan tersebut dapat menghasilkan respon sesuai yang diharapkan, namun pada saat stimulus dihentikan maka kestabilan yang pernah ada sebelumnya dapat muncul kembali. Sebagai contoh : pola makan dua kali sehari pada seseorang dapat diubah menjadi tiga kali sehari dengan menyediakan makanan sebanyak tiga kali pada jam tertentu setiap harinya dan dilakukan secara terus menerus. Pada saat makanan tidak lagi disediakan tiga kali orang tersebut akan kembali kepada pola makan dua kali sehari.

b. Kebiasaan (*habit*)

Kebiasaan dapat menjadi faktor pendukung untuk mengembangkan perencanaan perubahan namun di sisi lain kebiasaan dapat menjadi faktor penghambat. Kebiasaan mencuci tangan sebelum makan adalah contoh kebiasaan yang positif dan mendukung upaya peningkatan kesehatan sedangkan contoh kebiasaan yang negatif antara lain adalah membuang sampah sembarangan.

c. Hal yang utama (*primacy*)

Hal yang utama yang dimaksudkan adalah hal-hal yang berhasil memberikan hasil yang memuaskan. Ketika seseorang menghadapi suatu situasi tertentu dan tindakannya memberikan hasil yang

memuaskan maka ia cenderung akan mengulangi tindakan tersebut pada waktu yang lain dengan situasi yang sama. Sebagai contoh: seseorang yang sakit kepalanya sembuh karena mengkonsumsi suatu jenis obat tertentu akan memilih obat itu kembali ketika mengalami sakit kepala di waktu yang lain dan cenderung menolak alternatif obat yang lain.

d. Seleksi ingatan dan persepsi

Salah satu bentuk seleksi ingatan dan persepsi adalah terbentuknya sikap seseorang terhadap “obyek sikap” yang kemudian menimbulkan perilaku yang disesuaikan dengan “obyek sikap” tersebut. Sebagai contoh : sikap warga desa terhadap pejabat akan menimbulkan perilaku yang penuh hormat dan sopan santun apabila mereka bertemu dengan pejabat yang mendatangi desanya walaupun mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Pada kesempatan lain, sikap warga desa terhadap orang luar yang baru dikenalnya akan menimbulkan perilaku yang seolah-olah curiga dan ragu-ragu terhadap kehadiran orang baru tersebut.

e. Ketergantungan (*depedence*)

Ketergantungan suatu komunitas terhadap orang lain (misalnya terhadap pendamping sosial) menyebabkan proses “pemandirian” masyarakat membutuhkan waktu yang cenderung lebih lama.

f. Superego

Superego yang terlalu kuat dalam diri seseorang cenderung membuat ia tidak mau atau sulit menerima perubahan atau pembaharuan. Dorongan superego yang berlebihan dapat menimbulkan kepatuhan yang berlebihan pula.

g. Rasa tidak percaya diri (*self distrust*)

Rasa tidak percaya diri membuat seseorang tidak yakin dengan kemampuannya sehingga sulit untuk menggali dan memunculkan potensi yang ada pada dirinya. Hal ini membuat orang menjadi sulit berkembang karena ia sendiri tidak mau berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

h. Rasa tidak aman dan regresi (*insecurity and regression*)

Keberhasilan dan “masa-masa kejayaan” yang pernah dialami seseorang cenderung menyebabkan ia larut dalam “kenangan” terhadap keberhasilan tersebut dan tidak berani atau tidak mau melakukan perubahan. Contoh regresi ini adalah : seseorang yang tidak mau mengubah pola pertaniannya karena ia pernah mengalami masa-masa panen yang melimpah di waktu yang lalu. Rasa tidak aman berkaitan dengan keengganan seseorang untuk melakukan tindakan perubahan atau pembaharuan karena ia hidup dalam suatu kondisi yang dirasakan tidak membahayakan dan berlangsung dalam waktu cukup. Contoh rasa tidak aman ini antara lain : seseorang tidak berani mengemukakan pendapatnya karena takut salah, takut malu dan takut dimarahi oleh

pimpinan yang mungkin juga menimbulkan konsekuensi ia akan diberhentikan dari pekerjaannya.

b. Kendala yang berasal dari sistem sosial

a. Kesepakatan terhadap norma tertentu (*conforming to norms*)

Norma berkaitan erat dengan kebiasaan dalam suatu komunitas. Norma merupakan aturan-aturan yang tidak tertulis namun mengikat anggota-anggota komunitas. Di satu sisi, norma dapat mendukung upaya perubahan tetapi di sisi lain norma dapat menjadi penghambat untuk melakukan pembaharuan.

b. Kesatuan dan kepaduan sistem dan budaya (*systemic and cultural coherence*).

Perubahan yang dilakukan pada suatu area akan dapat mempengaruhi area yang lain karena dalam suatu komunitas tidak berlaku hanya satu sistem tetapi berbagai sistem yang saling terkait, menyatu dan terpadu sehingga memungkinkan masyarakat itu hidup dalam keadaan mantap. Sebagai contoh, perubahan sistem mata pencaharian dari ladang berpindah menjadi lahan pertanian tetap akan menimbulkan perubahan pada kebiasaan yang lain seperti pola pengasuhan anak, pola konsumsi dan sebagainya.

c. Kelompok kepentingan

Kelompok kepentingan dapat menjadi salah satu penghambat dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Misalnya, upaya

pemberdayaan petani di suatu desa tidak dapat dilaksanakan karena ada kelompok oleh agama atau sesuai dengan sistem patriaki.

d. Penolakan terhadap orang luar

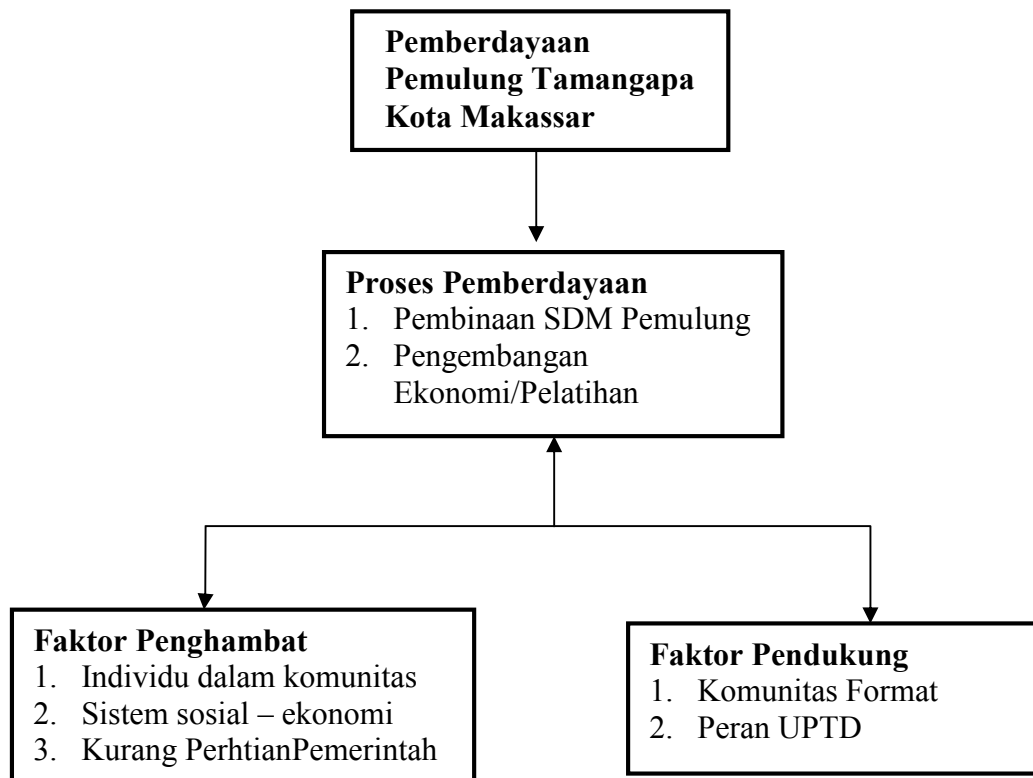
Anggota-anggota komunitas mempunyai sifat yang universal dimiliki oleh manusia. Salah satunya adalah rasa curiga dan “terganggu” terhadap orang asing. Pekerja sosial atau pendamping sosial yang akan memfasilitasi program pemberdayaan tentu akan mengalami kendala dan membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum ia dapat diterima dalam suatu komunitas. Di samping itu, rasa curiga dan terganggu ini menyebabkan komunitas enggan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh “orang asing” yang memfasilitasi program pemberdayaan di daerah mereka.

B. Kerangka Pikir

Dalam konteks Pemberdayaan pemulung di Kota Makassar, peran komunitas pemulung yang bekerjasama dengan pihak UPTD dalam proses pemberdayaan yang menunjang kebutuhan paran pemulung di lokasi penampungan sampah. Melihat bahwa komunitas pemulung sebagai salah satu wadah yang mempunyai peran vital dalam Pemberdayaan lingkungan dan pemulung, tentunya membutuhkan koordinasi baik secara internal maupun eksternal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dalam menciptakan koordinasi secara internal (vertikal) yang efektif perlu adanya kerjasama antar masyarakat setempat maupun instansi yang lain

saling terkait. Inti dari koordinasi itu sendiri adalah kesatuan tindakan, kesatuan sistem informasi juga mempunyai peran penting dalam menciptakan komunikasi yang efektif sehingga koordinasi yang efektif dapat terwujud. Koordinasi fungsional (horizontal) dalam konteks pemberdayaan pemulung memakai sistem pendekatan secara internal tujuan dari pendekatan tersebut untuk mengetahui fokus dalam pemberdayaan yang berupa sosialisasi pemulung dari segi ekonomi maupundari segi kesehatan berkoordinasi pemerintah UPTD dan komunitas pemulung kotaMakassar.



Gambar 1. Bagan Uraian Kerangka Pikir

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Pemberdayaan Pemulung ditempat Pembuangan Akhir (TPA). Tamangapa Antang Kota Makassar penelitian pemberdayaan dalam peningkatan Ekonomi. Fokus penelitian ini sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yaitu:

Pertama, proses pemberdayaan pemulung di TPA Tamangapa di Kota Makassar dengan melihat tiga aspek, yakni pengembangan lingkungan, pengembangan potensi ekonomi dan pembinaan SDM pemulung. *Kedua*, faktor pendukung yaitu adanya komunitas Format dan ralawan, dan faktor penghambat baik pada individu pemulung maupun problem ekonomi khususnya pada aspek sistem nilai penjualan barang bekas serta minimnya keterlibatan pemerintah baik pada konteks kebijakan maupun program pemberdayaan pemulung.

D. Deskripsi Fokus

Berdasarkan skema kerangka pikir diatas maka dapat dikemukakan deskripsi fokus sebagai berikut :

1. Proses Pemberdayaan Pemulung

Pemberdayaan yaitu proses yang dilakukan oleh komunitas “Forum Masyarakat Terpinggirkan (Format)” dengan sararan pemberdayaan pada kelompok pemulung di TPA Tamangapa Antang. Dalam pembahasan ini pemberdayaan adalah :

- 1) Pembinaan secara SDM Pemulung adalah memberikan pengarahan kepada pemulung dalam mengelompokkan sampah-sampah yang mereka

Kumpulkan

- 1) Pengembangan ekonomi yaitu memberikan bantuan kepada pemulung dalam pengembangan pendapatan mereka salah satunya pemanfaatan sampah yang masuk di TPA dari sampah yang basah maupun kering.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Pemulung

Faktor pendukung pemberdayaan pemulung yaitu:

- a. Forum Masyarakat Terpinggirkan (Format) adalah suatu lembaga yang tidak formal dalam artian lembaga ini bersefat akademik. Namun secara informan lembaga tersebut menjalin kerjasama dalam bentuk memberikan pengaraha agar sirkulasi pendapatan pemulung dapat ekonomi pemulung meningkat
- b. Peran UPTD TPA Tamangapa adalah suatu organisasi pemerintah di bawah naungan dinas pertamanan dan kebersihan yang di mana mempunyai peran aktif yaitu memanejemen sampah yang di TPA

Faktor penghambat dalam proses pemberdayaan pemulung yaitu :

- a. Individu dalam komunitas adalah pemulung yang di berdayakan oeh komunitas agar sumber pendapatan dapat meningkat walaupun profesi mereka hanya sebagai pemulung
- b. Sistem sosial – ekonomi adalah yang dimana pemulung hanya bergantung pad profesi mereka yang pendapatannyaberasal dari barang-barang bekas yang mereka kumpulkan TPA tamangapa

- c. Kurang perhatian pemerintah adalah tidak adanya regulasi dari pemerintah kita kepada pemerintah tamangapa dalam menangani permasalahan pemulung di TPA Tamangapa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian berlangsung selama 2 bulan mulai Bulan Januari hingga Februari 2016. Lokasi penelitian adalah di TPA Tamangapa Antang. Penelitian lokasi penelitian didasari pada perkembangan bahwa ekonomi dimana terdapat ratusan pemulung yang bermukim di TPA yaitu di Lokasi tumpukan sampah yang meninggi, sehingga perlu diberdayakan agar dapat hidup layak dari lingkungan sampah.

B. Jenis dan Tipe penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan mendeskripsikan Pemulung kota Makassar dengan mengkaji data yang diperoleh dari hasil observasi Lembaga Pekerja Pemulung, wawancara (*interview*) secara informan, serta studi dokumentasi secara objektif dalam bentuk narasi.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan Tipe penelitian Survey dimana bentuk penelitian adalah meneliti fenomena khusus yang hadir dalam suatu konteks yang terbatas (*bounded context*), meskipun batas-batas antara fenomena dan konteks tidak sepenuhnya jelas. Kasus tersebut dapat berupa individu, organisasi, karakteristik atau atribut dari individu-individu, peristiwa atau insiden tertentu, dan sebagainya. wawancara secara langsung dalam memahami

fenomena atau realitas yang terdapat dalam koordinasi penanggulangan Pemulung kota Makassar, kemudian akan menempatkan realitas tersebut sebagai konstruksi sosial kebenaran. Jenis penelitian ini bertujuan untuk meneliti sebuah fenomena dan makna yang terjadi pada kemitraan pemitraan pemerintah dalam pemberdayaan Pemulung dengan cara observasi, wawancara, maupun data dokumentasi dan studi kepustakaan yakni penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau dari informan penelitian.

C. Sumber Data

Adapun sumber data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan observasi di TPA kota Makassar, tentang Pemberdayaan Pemplung di TPA Antang kota Makassar.
2. Data Sekunder yaitu berupa beberapa dokumen berupa laporan-laporan kegiatan, bacaan dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan koordinasi penanggulangan Pemulung kota Makassar.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap imforman dan melakukan pencatatan secara sistematis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan segala peristiwa atau fenomena yang dialami oleh subjek penelitian yang berkaitan dengan pemulung.

2. Wawancara

Wawancara Mendalam adalah tanya jawab yang terbuka pada informan di TPA Tamangapa, serta ikut berpartisipasi secara langsung untuk memperoleh data tentang hal-hal yang terkait dengan Penelitian bertujuan untuk menggambarkan segala yang dialami oleh subjek penelitian yang berkaitan pemulung.

3. Dokumentasi

Dalam hal ini penulis mencari dan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan fokus permasalahan yang diteliti yaitu dokumen-dokumen tentang pemberdayaan pemulung dari Forum Masyarakat Terpinggirkan (Format) dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Kota Makassar terkait pemberdayaan pemulug.

E. Informan

Pemilihan informan dilakukan secara *puroposive sampling* yakni orang-orang yang dapat memberikan data yang akurat. Untuk mengklarifikasi pertanyaan sesuai tujuan penelitian Penentuan subjek atau informan dalam penelitian diambil dari Pemerintah Kota Makassar serta aparat-aparat terkait seperti Dinas Sosial Kota Makassar dan pemulung dikawasan TPA Antang Jumlah informan adalah 7 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Informan

No	Nama	Inisial	Jabatan	Keterangan
1	H. Arifuddin. S.Sos	HA	Kepala Kelurahan Tamangapa	1 Orang
2	Sakka Saleh, S.Sos	SS	Kepala UPTD Tamangapa	1 Orang
3	Rosnawati	RT	Forum Masyarakat Terpinggirkan	1 Orang
4	Rasniar	RS	Pemulung	1 Orang
5	Sudirman	S	Pemulung	1 Orang
6	Mantan	M	Pemulung	1 Orang
7	Jumariah	JH	Pemulung	1 Orang
		Jumlah		7 Orang

F. Teknik Analisis Data

Menurut Matew Milles dan Huberman (2007:18) dalam bukunya yang berjudul *Analisis Data Kualitatif* terdapat tiga komponen analisis yaitu

1. Reduksi Data

Yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan, yang tertulis di lapangan. Reduksi data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah analisa yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data terasa sesudah penelitian di lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Pada pengumpulan data terjadilah tahapan reduksi selanjutnya yaitu membuat ringkasan mengenai penelitian ini. Reduksi data sebagai proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan.

2. Penyajian Data

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data-data yang ada dikelompokkan pada bagian atau sub bagian masing-masing. Data yang disajikan disesuaikan dengan informasi yang didapat dari catatan tertulis di lapangan. Dengan penyajian data tersebut akan dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, menganalisis ataukah tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Permulaan pengumpulan data, penganalisis kualitatif mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola kejelasan, konfigurasi-konfigurasi yang 49 mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Penelitian yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, kemudian lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan akhir mungkin muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada kesimpulan-kesimpulan catatan lapangan, pengodeannya, penyimpanannya, metode pencarian ulang yang digunakan dan kecakapan penelitian.

G. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data penelitian ini dilakukan melalui tahap pengecekan kredibilitas data dengan teknik *triangulation* yaitu mengecek

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan triangulasi sumber, metode dan teori. Adapun model triangulasi yang digunakan adalah *memberchek*, yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data.

Tujuan *memberchek* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya telah valid, sehingga semakin kredibel dan dapat dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Pada sub pembahasan ini diuraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu TPA Tamangapa Kota Makassar sebagai pengantar awal untuk pembahasan berikutnya. Dalam uraian ini dikemukakan kondisi di lapangan tentang kondisi geografis, demografis dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat terkhusus warga pemulung di TPA Tamangapa.

1. Gambaran Umum Lokasi TPA Tamangapa Antang

TPA Tamangapa terletak di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar yang mempunyai luas lokasi $\pm 14,3$ ha, ketinggian 7mdpl dari permukaan laut ± 5 km dari ibu kota kecamatan. Jalan masuk menuju TPA dari pusat kota 15 km yang merupakan tempat pembuangan sampah rumah tangga, perkantoran dan tempat pejualan makanan siap saji di daerah kota Makassar, di dalam areal TPA terdapat juga bangunan kantor, bangunan rumah pengomposan, sekolah, sarana kesehatan dan bangunan perumahan. Lokasi tersebut mulai berdiri pada tahun 1993 dan satu-satunya tempat pembuangan sampah dikota Makassar.

TPA Tamangapa merupakan tempat pembuangan sampah utama bagi penduduk kota Makassar. Dengan ini peningkatan volume sampah yang masuk di TPA Tamangapa semakin meningkatkan seiring bertambah penduduk warga masyarakat sehingga masuknya sampah di TPA semakin

meningkat. TPA Tamangapa memperluas wilayahnya sekitar 18 ha menjadi 255 ha pada tahun 2007 dan data terakhir dari badan statistik luas wilayah luas wilayah TPA Tamangapa sekitar 2450 ha pada tahun 2014.

2. **Kondisi Pemulung TPA Tamangapa**

Pemulung yang menjadi perhatian bagi penulis adalah pemulung yang bermukim di kelurahan tamangapa kecamatan mangala Kota Makassar. Terdapat 422 kepala keluarga (KK) pemulung. Secara rinci dapat di jelaskan bahwa jumlah pemulung semua 780 orang pemulung laki-laki berjumlah 379 orang dan perempuan 401 orang. Dalam klasifikasi usia, kemunias pemulung dibagi menjadi: pemulung remaja yang berusia 19-33 orang berjumlah 199 orang, laki-laki berjumlah 122 orang dan perempuan berjumlah 77 orang. Kelompok umur 16-18 tahun berjumlah 514, laki-laki berjumlah 306 orang, perempuan 208 orang. Sementara umur 5 tahun kebawah berjumlah 290 orang, laki-laki berjumlah 135 orang dan perempuan berjumlah 155 orang (FORMAT, januari 2014)

Pemulung yang bermukim di kelurahan tamangapa di kota Makassar ini melakukan aktifitas mereka di tempat pembuangan akhir sampah (TPA) tamangapa, kecamatan mangala kota Makassar. Mereka berasal dari latar belakang etnis yang berbeda, di Sulawesi selatan.

Melihat kompleksitas kehidupn social pemulung ini maka penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih mendalam berkaitan dengan perubahan social yang telah terjadi tersebut sebelum adanya aktifitas pendampingan yang dilakukan oleh format di TPA Tamangapa Antang.

dalam melakukan aktifitasnya, format juga di dukung oleh lembaga pemerintahan seempat seperti kelurahan Tamangapa dan UPTD karena dengan hadirnya komunitas pemulung tersebut pekerjaan mengani social sangat membantu.

3. **Forum Masyarakat Terpinggirkan (FORMAT) TPA Tamangapa kota Makassar**

Forum masyarakat terpinggirkan kelurahan tamangapa merupakan suatu komunitas yang memperhatikan nasib para pemulung yang memunyai perean sangat penting bagi masyarakat pemulung TPA. Komunias ini untuk memudahkan dan mempelancar sirkulasi dalam mengelola barang-barang bekas yang dikumpulkan para pemulung dari tumpukan sampah. Dalam peran FORMAT ini para pemulung di berikan pemahaman cara mengelola sampah agar nilai barang yang mereka jual dapat naik. Salah satu caranya yaitu dengan memisahkan sesuai dengan jenisnya maka pemulung dari setiap mengepulkan barang bekas mereka sudah tahu yang mana nilai barang yang sangat tinggi di jual karena selama ini pemulung tahunya mengepulkan dan jual saja.

Dalam mengepulkan dan memilah barang sebanyak-banyaknya pemulung menggunakan yang sangat Tradisional yang di bantu oleh Forum masyarakat terpinggirkan (FORMAT). Alat tersebut berupa:

- Gerobak dua roda . alat ini sangat berfungsi sekali dalam mengais barang yang berguna karena dengan gerobak ini dapat mengumpulkan barang bekas sebangak-banyaknya.

- Karung. Biasanya alatnya dipakai supaya lebih praktis agar dapat memilah-milah sampah yang sesuai dengan jenisnya dari hasil mulung.

**Tabel peranan masing-masing status social dalam komunitas
pemulung**

Kelurahan TPA Tamangapa

Lapisan social	Peran
FORMAT	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sebagai instruktur dan motivator ○ Sebagai pemimpin dalam komunitas pemulung ○ Sebagai pengepul barang-barang bekas
PEMULUNG	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sebagai pekerja pencarian barang bekas ○ Terpenuhi kebutuhan hidup ○ Meningkatkan pendapatannya

Keberadaan FORMAT memang menjadi juru selamat para pemulung.

Bagaimana tidak komunitas ini yang memberikan masukan para pemulung dalam meningkat prekonomian dan membantu pemulung dalam menyediakan peralatan yang sangat membantu pemulung dalam melakukan pekerjaan mereka dan mengerjakan dalam memilah sampah yang bernilai ekonomi untuk kelangsungan hidup mereka, dengan tidak meninggalkan sama sekali hubungan-hubungan lain yang lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi.

B. Proses Pemberdayaan Pemulung di TPA Tamangapa KotaMakassar

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara terhadap seluruh informan penelitian, temuan data menunjukkan bahwa model pemberdayaan pemulung di TPA Tamangapa adalah berbasis sumber daya atau partisipasi masyarakat yang secara konseptual disebut *Community Based Development* (CBD). Adapun yang dimaksud *Community Based Development* di lokasi TPA

Tamangapa adalah sebuah komunitas pemulung yang membentuk organisasi yang bernama “Forum Masyarakat Terpinggirkan (Format)”.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari ketua Format, menuturkan beberapa dasar sehingga kelompok Format dibentuk dengan fungsi utamanya adalah untuk memberdayakan warga pemulung di TPA Tamangapa, antara lain diuraikan sebagai berikut:

1. Pembinaan SDM pemulung

Pembinaan SDM pemulung ini dilakukan agar masyarakat pemulung dapat memperbaiki dari segi sistem pemahaman dalam pengelolaan limbah sampah yang bernilai ekonomi sehingga permasalahan tersebut dapat teratasi dengan memberikan pemahaman atau pengajaran dalam mengelola sampah yang mereka kumpulkan.

“Kita tahu di Makassar ini kan permasalahan limbah sangat mengkhawatirkan. Kalau kita hitung volume sampah setiap harinya yang dibawa ke TPA Tamangapa Antang itu tidak kurang dari 3800 m³ dari 1,3 juta jiwa penduduk Makassar saat ini. Kami menilai permasalahan limbah ini sangat mendesak untuk dicarikan solusi. Apalagi kalau kita lihat kenyataan warga pemulung di TPA Tamangapa, mereka itu kan pendidikannya rata-rata hanya sampai jenjang sekolah dasar (SD). Kondisi itu yang membuat mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan layak apalagi untuk menafkahi keluarganya karena modal mereka hanya ijazah tamatan sekolah dasar (SD). Anak-anak pemulung di sini juga kebanyakan tidak sekolah (Wawancara dengan RT pada tanggal 13 Januari 2016)

Berdasarkan keterangan informan tersebut, yang mengungkapkan permasalahan lingkungan dan kapasitas SDM pemulung yang kurang berpendidikan serta tergolong masyarakat miskin, maka beberapa relawan berinisiatif melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan membentuk suatu kelompok yang diberi nama “Format” (Forum Masyarakat

Terpinggirkan). Selain sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib para pemulung di TPA Tamangapa, Format didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM pemulung itu sendiri, yakni memberikan pengetahuan tentang metode pengelolaan sampah yang mereka kumpulkan menjadi bernilai ekonomi.

Upaya pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Format diharapkan dapat meningkatkan perekonomian para pemulung meskipun dengan pekerjaan sebagai pemulung. Terkait dengan hal ini keterangan wawancara dengan relawan Format juga menjelaskan bahwa target dari program pemberdayaan yang diharapkan adalah peningkatan perekonomian masyarakat pemulung di TPA Tamangapa.

“Yang kami lakukan sebagai relawan (Format) adalah membimbing pemulung untuk mengelola sampah, misalnya mengumpulkan hasil-hasil barang bekas dan memisahkan barang yang tercampur sehingga nilai barang yang dihargai untuk pemulung lebih tinggi dari sebelumnya. Kalau tujuan jangka panjangnya itu supaya ada peningkatan perekonomian pemulung dengan membimbing mereka supaya berwirausaha yang nantinya berdampak pada peningkatan perekonomian pemulung. Tentu ini juga jadi solusi supaya kemiskinan dan pengangguran di Makassar dapat kita tangani (Wawancara dengan RT pada tanggal 13 Januari 2016)

Pernyataan informan di atas diketahui bahwa metode pemberdayaan pemulung yang dilakukan oleh Format adalah pembinaan SDM pemulung untuk berwirausaha. Dengan kata lain anggota Format mengadakan pelatihan langsung terhadap pemulung di TPA Tamangapa, meliputi pengelolaan pendapatan dari hasil memulung sehingga dapat dijadikan sebagai modal pengembangan usaha. Dengan demikian terjadi taraf peningkatan SDM

pemulung yang tadinya hanya bertumpu dari sekedar menjadi pemulung meningkat menjadi wirausaha.

Berkenaan dengan pembinaan SDM pemulung di TPA Tamangapa, ketua Format menuturkan tentang perlunya sumber daya atau partisipasi masyarakat yang memberikan motivasi kepada pemulung untuk berwirausaha dengan modal yang diperolehnya dari aktivitas memulung.

“... Setiap program pemberdayaan masyarakat untuk para pemulung diperlukan orang-orang yang dapat memberikan motivasi kepada teman-teman dalam mengelolah hasil mulung mereka dalam bentuk barang yang mereka kumpulkan dan menjadi uang yang kemudian uang tersebut bisa diputar menjadi modal usaha mereka sendiri demi keluarga mereka terutama anak-anak mereka yang dapat melanjutkan sekolahnya yang lebih tinggi lagi”. (Wawancara dengan SS pada tanggal 20 Januari 2016)

Hal senada diungkapkan oleh Kepala Kelurahan Tamangapa yang menyatakan bahwa dengan partisipasi aktif Format yang dianggap sangat berkontribusi mengatasi kesenjangan sosial yang dialami oleh pemulung:

“... saya sangat berterima kasih kepada relawan yang masih saja mau membantu para pemulung disana walaupun status mereka bukan lagi sebagai pemulung tetapi kerja apa yang mereka lakukan sudah melebihi cukup dalam membantu kesenjangan sosial pemulung di daerah penampungan sampah tersebut” (Wawancara dengan HA, 21 Januari 2016).

Berdasarkan pernyataan informan di atas, maka dapat diketahui bahwa dengan hadirnya Format sebagai organisasi pemberdayaan pemulung yang berbasis sumberdaya masyarakat setempat, secara tidak langsung membantu kinerja pemerintah. Dalam konteks ini pihak Pemerintah Kelurahan mengatakan sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan para relawan Format yang masih peduli pada nasib para pemulung yang tengah berjuang

menafkahi keluarga mereka. Hal yang senada juga diungkapkan salah seorang pemulung yang sangat dibantu dengan forum ini, beliau menyampaikan bahwa:

“Kami sangat berterima kasih bahwa masih ada orang-orang yang masih memedulikan nasib kami serta forum ini membantu kami pula membantu kami dalam penjualan barang yang dikumpulkan dari hasil dan mereka menghargai barang kami sangat tinggi dari pada pengepul lainnya. (Wawancara dengan S, 13 Februari 2016)

Berdasarkan pernyataan informan diatas, maka peran Forum Masyarakat Terpinggirkan (Format) sangat membantu kelangsungan hidup para pemulung, salah satunya mereka menjadikan forum ini sebagai wadah bagi para pemulung untuk menjual barang hasil memulung dan barang tersebut dihargai sangat tinggi diantara pengepul barang yang lain. Dari keterangan seluruh informan, juga diketahui bahwa masyarakat pemulung di TPA Tamangapasesungguhnya sangat memerlukan keterlibatan atau partisipasi masyarakat lain untuk memberdayakan mereka. Sekurangnya seperti yang dikatakan informan adalah kepedulian warga terhadap nasib para pemulung dengan memberikan motivasi bahwa mereka dapat berkembang dalam meningkatkan pendapatan melalui solusi berwirausaha.

Gambaran tentang peran Format sebagai *Community Based Development* tersebut, dapat dilihat tujuan pemberdayaan yang dilakukan oleh komunitas ini adalah berupaya membangun kesadaran pemulung agar dapat hidup mandiri terutama menghadapi problem kemiskinan dan keterbelakangan. Kemiskinan pada komunitas pemulung di TPA Tamanga padapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum layak

baik itu pangan, pakaian, papan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan keterbelakangan yang dimaksud adalah kapasitas sumberdaya yang lemah para pemulung sehingga memengaruhi produktivitas mereka yang cenderung stagnasi atau tidak mengalami kemajuan.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, keberadaan Format di TPA Tamangapa sebagai kelompok pemberdayaan pemulung berbasis partisipasi masyarakat (*Community Based Development*) memiliki dua bentuk kegiatan pemberdayaan, yaitu (a) pembinaan SDM pemulung dan (b) pengembangan ekonomi. Kedua kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Format tersebut sejalan dengan konsep *Enabling* yakni menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, dan konsep *empowering* yakni memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat.

Para pemulung di TPA Tamangapa adalah bagian dari masyarakat kota Makassar. Pemulung di TPA Tamangapa sebenarnya mempunyai kontribusi untuk mengurangi volume jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat kota Makassar. Dalam hal ini para pemulung mempunyai andil yang sangat besar secara ekologis karena mengurangi volume sampah yang dibuang ke lingkungan bebas. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa sumber pendapatan ekonomi bagi para pemulung terutama diperoleh dari muatan truk yang mengangkut sampah rumah tangga dan pusat-pusat penjualan di kota Makassar. Para pemulung kemudian secara individu maupun berkelompok mengumpulkan sampah yang telah dibongkar oleh truk tersebut.

Namun demikian aktivitas pemulung di TPA Tamangapa dianggap kurang produktif karena kurang memahami teknis pengolahan sampah atau cara menentukan jenis-jenis sampah yang bernilai komoditas sehingga dapat didaur ulang atau diperjualbelikan. Dengan melihat aktivitas pemulung di TPA Tamangapa yang kurang produktif itulah sehingga para relawan Format menerapkan kegiatan pemberdayaan bagi pemulung di TPA Tamangapa khususnya memberikan bimbingan atau penyuluhan. Berkaitan dengan hal ini, relawan Format mengemukakan:

Kami selaku pengurus forum ini berinisiatif melakukan suatu pengembangan dalam segi pendapatan pemulung dengan cara memberikan penyuluhan kepada pemulung agar dapat memilah sampah yang mereka kumpul dan mereka dapat menentukan barang yang kualitas harganya mahal dari pada barang lain sehingga keterpurukan akibat turunnya prekonomian Indonesia bisa teratasi. Selain itu forum ini membuat suatu wadah yang bertugas sebagai pengepul barang hasil dari pemulung dan kemudian harga barang yang dihargai oleh pemulung lebih baik dari pada penada lainnya.” (Wawancara dengan RT, 13 Januari 2016).

Berdasarkan keterangan relawan Format tersebut di atas, para pemulung di TPA Tamangapa diberdayakan dengan cara diberikan penyuluhan untuk mentransformasi pengetahuan kepada pemulung tentang pengelolaan sampah atau limbah yang bernilai ekonomi atau dapat meningkatkan daya beli pihak yang mereproduksi sampah tersebut. Berkenaan dengan hal ini informan menuturkan keterangan sebagai berikut:

Sampah yang diambil pemulung itu umumnya anorganik, seperti plastik, besi, kertas yang mereka masukkan ke dalam karung saat mereka kerja. Sampah anorganik ini kalau kita timbun saja butuh waktu lama terurai dan nilai jualnya kurang. Karena itu kami coba arahkan supaya mereka memulung sampah yang bisa lebih menghasilkan nilai ekonomi (Wawancara dengan HA pada tanggal 20 Januari 2016)

Berdasarkan keterangan dari informan tersebut di atas, diketahui bahwa bentuk kegiatan pemberdayaan pemulung dilihat pada tindakan atau keterlibatan langsung para relawan Format maupun memberikan penyuluhan kepada pemulung terkait upaya meningkatkan pendapatan mereka melalui pengolahan sampah sehingga *outcome* yang ditargetkan adalah terjadinya taraf peningkatan dalam perekonomian dan kesejahteraan keluarga mereka.

Pengolahan sampah tersebut dapat mengurangi volume sampah atau merubah bentuk menjadi lebih bermanfaat. Sampah yang telah dikumpulkan oleh pemulung diolah lebih lanjut oleh relawan Format, baik di lokasi sumber sampah maupun setelah sampai di TPA. Tujuannya agar sampah dapat dimanfaatkan kembali, sehingga dapat mengurangi tumpukan sampah serta memperoleh nilai ekonomi dari sampah.

2) Pengembangan ekonomi/pelatihan

pengembangan ekonomi / pelatihan yang dimana memiliki suatu upaya untuk melakukan perubahan pada pemulung dalam proses peningkatan pendapatan ekonomi yang dapat menguntungkan pemulung demi memperbaiki kualitas pemulung itu sendiri. aspek pengembangan ekonomi melalui pengolahan limbah antara lain:

1. Pengolahan sampah organik

- a. Sampah organik untuk pakan ternak. Sampah organik, khususnya sisa makanan, dapat diolah lebih lanjut menjadi pakan ternak. Sampah yang telah dipilah, kemudian dijadikan pakan ternak sapi. Dari sampah

organik yang kebanyakan merupakan sisa makanan merupakan pakan ternak sapi.

- b. Kompos atau pengomposan adalah proses dimana bahan organik mengalami penguraian secara biologis. Jadi, pada prinsipnya semua bahanbahan organik padat dapat dikomposkan, misalnya: limbah organik rumah tangga, sampah organik pasar, kertas, kotoran/limbah peternakan, limbah-limbah pertanian dll

2. Pengolahan sampah anorganik

Daur ulang adalah salah satu strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian dan pembuatan produk/material bekas pakai. Upaya pengolahan sampah tersebut bertujuan untuk memanfaatkan material yang masih berguna untuk digunakan kembali, dan secara tidak langsung dapat memperpanjang umur pakai TPA.

Diketahui bahwa pemulung tidak hanya memulung sampah, akan tetapi mengolah sampah untuk mengurangi volume sampah sekaligus merubah bentuk menjadi lebih bermanfaat atau bernilai. Sampah yang telah terkumpul diolah lebih lanjut, baik di lokasi sumber sampah maupun setelah sampai di TPA Tamangapa. Tujuannya agar sampah dapat dimanfaatkan kembali, sehingga dapat mengurangi tumpukan sampah serta memperoleh nilai ekonomi dari sampah.

Keterangan informan tersebut di atas sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti. Data pengamatan menunjukkan bahwa

hampir setiap hari pemulung di TPA Tamangapa mengolah sampah dan sebagian lainnya membereskan barang-barang rongsokan misalnya mengupas kabel untuk diambil tembaga dan aluminiumnya. Jadi selain secara kolektif, pemberdayaan ditingkat personal juga dilakukan oleh beberapa orang Pemulung di TPA Tamangapa. Hal ini misalnya diungkapkan oleh seorang pemulung yang menyatakan keterlibatannya dalam pemberdayaan pemulung :

“Pemulung di sini mencari rongsok untuk dijual pada pengusaha yang membeli barang-barang rongsok tersebut, kemudian dijual lagi ke pabrik atau lapak-lapak yang lebih besar, namun tidak semua barang rongsokan itu dapat dijual atau didaurulang lagi”. (Wawancara dengan S, 13 Februari 2016).

Informan di atas menjelaskan pengalamannya ketika menjadi pemulung sekaligus pengepul yang sering mengumpulkan atau menerima barang rongsok. Rumah informan ini berada tidak jauh dari TPA Tamangapayang dijadikan sebagai lapak barang rongsokan. Berdasarkan pengalaman informan ini kemudian disosialisasikan kepada pemulung lain tentang cara mengolah barang-barang rongsokan yang dapat diperjualbelikan, seperti besi, logam (aluminium, kuningan, tembaga, kuali, tebal, dan babet), seng, kertas (bekas kerdus, buku-buku bekas), plastik (plastik kresek hitam, bekas tempat air mineral, paralon).

Proses pemberdayaan pemulung di area TPA Tamangapa sebenarnya diawali dengan cara mengubah persepsi pemulung itu sendiri baik melalui penyuluhan maupun dengan cara menunjukkan praktik pengolahan sampah. Jadi persepsi pemulung yang diubah adalah anggapan

semua barang bekas yang sudah dibuang di TPA tidak dapat dimanfaatkan lagi, melainkan sampah atau barang-barang rongsokan menjadi sebuah peluang usaha yang menjanjikan atau sebagai sumber penghasilan yang dapat diperjualbelikan dalam rangka menunjang perekonomian pemulung.

Hal ini dijelaskan oleh ketua "Format" beliau mengatakan bahwa:

"Karena yang saya tahu setiap orang yang mempunyai usaha seperti ini, mereka dapat mencukupi biaya hidupnya dan tidak sedikit dari mereka dapat menunaikan ibadah haji, Alasannya ternyata karena jika menjual langsung ke pabrik peleburan besi dan logam harus sekaligus banyak, minimal satu truk. Jika jumlahnya sedikit dan dipaksakan menjual langsung ke pabrik, akan merugi karena biaya perjalanan cukup besar, sedangkan harga barang murah (untuk jenis besi) sedangkan Biasanya yang menjual langsung ke pabrik adalah pengusaha yang lebih besar. Mereka dapat menjual besi dan logam hingga dua truk besar. Sedangkan jenis tembaga dan almunium tidak dijual langsung ke pabrik karena orang yang menjual barang-barang jenis ini sedikit." (Wawancara dengan RT, 20 Januari 2016).

Pernyataan informan di atas, diketahui bahwa pemberdayaan pemulung dalam hal teknis pengolahan sampah sangat diperlukan, sebab tidak semua pemulung di TPA Tamangapa mengetahui proses pemasaran dan akses-akses kemitraan yang dapat menerima sampah atau barang-barang rongsokan untuk didaur ulang atau diperjualbelikan. Kurangnya pemahaman pemulung tentang proses pemasaran dan akses kemitraan bisnis sehingga kadang dalam melakukan transaksi jual beli kepada perusahaan atau pabrik mengalami kendala. Tidak hanya menyangkut nilai suatu barang tetapi juga memerlukan kuantitas atau bahan yang cukup besar untuk dijual kepada perusahaan yang diajak kerjasama. Karena barang dengan jumlah sedikit inilah pemulung di TPA Tamangapa sering mendapat

keuntungan yang sedikit pula atau justru mereka merugi. Hal ini terindikasi dari pernyataan informan berikut:

Kalau barang rongsokanitu sudah dibeli dari pemulung, tidak langsung dijual, tapi harus dipilah-pilah mana yang harganya murah dan mana yang harganya mahal. Sama seperti tembaga yang paling mahal kalau dibandingkan besi atau plastik. Makanya pemulung harus memilih dan mengumpulkan sebanyak mungkin supaya perusahaan mau kerjasama.

Adanya kendala seperti yang terungkap di atas maka relawan Format juga berupaya mengembangkan jaringan kemitraan dengan lembaga-lembaga ekonomi agar aktivitas pemulung mengumpulkan sampah dapat dijual kepada perusahaan yang membutuhkan. Dengan terlibatnya relawan Format untuk memperluas akses pemasaran tersebut, maka daya jual sampah reproduksi dapat meningkat atau memperoleh harga diatas pengepul lainnya. Dengan terlaksananya pemberdayaan pemulung oleh komunitas Format, maka terjadi peningkatan ekonomi dari pemulung di TPA Tamangapa sebagaimana yang diungkapkan oleh informan berikut:

Tujuannya forum ini bagaimana supaya kebutuhan keluarga mereka dapat terpenuhi dari segi sandang, pangan dan papan. Pemberdayaan yang kami lakukan dalam forum komunitas pemulung berhasil karena pendapatan mereka dapat ditingkatkan dari Rp 900 ke harga Rp 1.500 perkilonya ... sumbernya dari semua sampah yang bisa dijual, contoh sampah bahan plastik, barang yang terbuat dari besi-besi, botol botol kaca dan lain-lain dikumpulkan(Wawancara dengan RT pada tanggal 13 Januari 2016)

Demikian halnya hasil wawancara dengan anggota komunitas pemulung di TPA Tamangapa, diketahuibahwa setiap hari mereka dapat menghasilkan pendapatan berkisaran Rp.30.000-50.000. Dengan

pendapatan ekonomi yang cenderung meningkat tersebut, pemulung di TPA Tamangapa merasakan manfaatnya khususnya dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dengan demikian kontribusi Format dalam pemberdayaan pada aspek pengembangan ekonomi berpeluang untuk lebih dikembangkan sebagai sarana untuk mengentaskan kemiskinan pemulung. Selain itu, terdapat kontribusi dari pihak lain, yakni bantuan secara ekonomis dari para pengusaha yang memberikan santunan atau bantuan secara tunai dalam bentuk dana atau dalam bentuk barang yang kemudian diserahkan kelompok Format untuk menunjang pemberdayaan pemulung di daerah TPA Tamangapa.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Pemulung Dalam Pengelolaan Sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar

1. Faktor Pendukung Pemberdayaan Pemulung TPA Tamangapa

a. Forum Komunitas Terpinggirkan Tamangapa (Format)

Kondisi kehidupan pemulung tidak lepas dari peran aktif komunitas atau organisasi yang memperhatikan nasib kaum pemulung, yang melihat realitas kehidupan pemulung dibawah garis kemiskinan sehingga para pemulung perlu diberdayakan dari pendapatan ekonomi mereka. Sistem yang dilakukan oleh para komunitas/organisasi dalam melakukan pemberdayaan yaitu sistem hubungan kerjasama/kemitraan.

Sistem kerjasama atau kemitraan ini berperan aktif dalam membantu peningkatan ekonomi produktif mereka salah satunya mengumpulkan barang-barang hasil para pemulung yang bisa dijual

kepada perusahaan atau pabrik daur ulang yang bisa menjadikan barang tersebut baru kembali. Harga perusahaan pun harus bisa membantu dalam peningkatan kebutuhan ekonomi pemulung agar pendapatan hidup mereka bisa terpenuhi dari sandang, pangan dan papan.

Temuan data penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan komunitas pemulung yang membentuk organisasi bernama Forum Komunitas Terpinggirkan (Format) menjadi faktor pendukung utama terlaksananya pemberdayaan pemulung berbasis swadaya masyarakat atau disebut *Community Based Development* (CBD). Adapun yang dimaksud bentuk nyata pemberdayaan pemulung yang dilakukan oleh Format adalah bimbingan atau penyuluhan kepada anggota pemulung yang tergabung dalam komunitas ini. Selain itu pemulung di TPA Tamangapa juga dibekali dengan keterampilan teknis pengolahan sampah.

b. UPTD TPA Tamangapa

Pemerintah Kota Makassar mempunyai institusi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh dalam menangani masalah yang berkaitan dengan lingkungan, seperti sampah, air limbah, penghijauan dan taman kota, yaitu Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. Pembentukan Dinas Pertamanan dan Kebersihan di Kota Makassar berdasarkan keputusan Walikota Makassar yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009, tanggal 7 Mei 2009, tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar.

Salah satu tugas Dinas Kebersihan Kota Makassar adalah menyusun rumusan program pembinaan, pengembangan, dan koordinasi serta kerjasama dengan pihak terkait dibidang persampahan termasuk di dalamnya menyangkut peran serta masyarakat. Sedangkan fungsinya adalah merencanakan dan memantau pengelolaan sampah diantaranya pembersihan dan pengangkutan sampah..

Dinas Pertamanan dan Kebersihan membawahi 4 bidang dan 1 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yang menangani masalah persampahan yaitu Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan, yang mempunyai tugas mengurus pembinaan Kelembagaan Masyarakat, pengembangan partisipasi, penyuluhan dan pembinaan teknis, serta Bidang Penataan kebersihan Kota yang mengurus masalah pengembangan teknik pengelolaan kebersihan kota, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebersihan kota, dan pemeliharaan peralatan dan alat berat

UPTD Tamangapa dalam hal ini secara tidak langsung berkontribusi terhadap masyarakat pemulung dengan kebijakannya membiarkan ruang bagi pemulung untuk mencari nafkah dari sampah-sampah yang masuk di UPTD dikarenakan pihak UPTD lebih memfokuskan sampah yang masuk di TPA Tamangapa akibat makin meningkatnya pusat penjualan yang produksi penjualan makin meningkat termasuk penjualan yang mengadung sampah sehingga dari pihak sangat kewalahan mengatur sampah yang masuk. Jadi kontribusi pihak UPTD hanya sampai dengan membolehkan pemulung mengaris rezeki di lokasi

TPA Tamangapa. Permasalahan yang terjadi TPA Tamangapa terhadap nasib para masyarakat pemulung tak lepas dari peran seseorang atau kelompok yang peduli nasib para kaum pemulung yang dilihat bahwa mereka sangat perlu dibantu.

2. Faktor Penghambat Pemberdayaan Pemulung TPA Tamangapa

a. Faktor Individu Pemulung

Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan pemulung di TPA Tamangapa adalah faktor individual. Dalam hal ini kurangnya kesadaran pemulung di TPA Tamangapa untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan mereka sehingga pola kehidupan dan penghasilan ekonomi mereka juga stagnan atau tidak berkembang. Meskipun harus diakui bahwa pekerjaan komunitas pemulung memang membantu mengurangi sampah yang menumpuk dari hasil sampah masyarakat yang di buang di TPA Tamangapa, tetapi disisi lain kurangnya pengetahuan mereka juga memberikan pengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya termasuk dalam peningkatan taraf hidup yang lebih baik.

Pengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat di sekitar TPA Tamangapa adalah terciptanya kendala kemacetan jalan di area TPA tersebut karena kegiatan pemulung menjadi salah satu penghambat jalan truk sampah yang ingin masuk ke dalam TPA Tamangapa. Kebiasaan-kebiasaan para pemulung mengumpulkan barang hasil mulung mereka yang ditaruh bukan pada tempatnya, mengganggu proses masuk truk sampah ke dalam TPA Tamangapa. Kondisi ini sangat problematis karena

bagi pemulung satu-satunya pekerjaan yang mampu menopang perekonomiannya mereka adalah memulung sampah. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang pemulung yang memperjelas hambatan mereka di dalam daerah penampungan, beliau menyampaikan bahwa :

“... Ya jelasnya sekarang ini tidak ada jalan lain lagi yang bisa kami lakukan walaupun aktifitas ini mengandung resiko yang sangat tinggi tetapi inilah jalan satu-satunya yang bisa kami lakukan demi menafkahi keluarga kami. Anak-anak juga sulit untuk kami biayai sekolahnya sampai kuliah karena tidak cukup kalau cuma dari hasil memulung”. (Wawancara dengan JH, 14 Februari 2016).

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pekerjaan pemulung yang identik dengan sampah yang meskipun mereka sebenarnya sadar bahwa pekerjaan itu sangat beresiko, tetapi pekerjaan memulung ini sangat berarti bagi para pemulung itu sendiri. Jika ditelaah lebih jauh, keadaan pemulung yang selalu ingin bergelut dalam pekerjaan yang cenderung tidak dapat meningkatkan pendapatan mereka disebabkan strata pendidikan mereka sangat rendah sehingga untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sangat susah bagi mereka.

Terkait dengan keberadaan komunitas Format di TPA Tamangapa, dalam pengamatan dan wawancara terhadap pengurusnya, belum ditemukan adanya program dari mereka untuk memberdayakan pemulung TPA Tamangapa khususnya yang berkaitan dengan pendidikan. Kondisi pemulung di area TPA Tamangapa tersebut mayoritas belum pernah mengenyam dunia pendidikan. Oleh karena kemampuan berfikir pemulung yang berbeda dengan warga lainnya, membuat mereka sangat kurang dalam hal pengetahuan dan keterampilan.

Sebagian besar informan yang ditemui mengatakan bahwa mereka mengeluti profesi ini karena hidupnya serba berkecupan dengan menafkahi anak-anaknya sedangkan kondisi prekonomian khususnya terkait harga hasil memulung rata-rata hanya dihargai Rp 900 per kilonya. Dengan demikian pekerjaan memulung inilah yang menjadi pekerjaan utama untuk mencukupi kebutuhan ekonomi di samping melakukan pekerjaan tambahan sebagai buruh cuci perumahan sekitar Tamangapa. Profesi pemulung itu juga menjadi pekerjaan tetap para pemulung karena mayoritas pemulung hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat SMP saja sehingga untuk mencari pekerjaan yang layak dianggap sangat susah dengan bermodalkan Ijazah SMP saja sedangkan perusahaan hanya menerima minimal lulusan SMA. Oleh karena itu mayoritas pemulung memutuskan untuk bekerja sebagai pemulung saja yang bisa dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan anak-anak mereka. Hal ini misalnya dituturkan oleh informan:

“Sebenarnya pekerjaan inilah yang bisa saya kerjakan sebagai pemulung disebabkan pendidikan saya hanya sampai jejang bangku SMP saja maka dari itu pekerjaan pemulunglah jalan satu-satunya yang bisa di kerjakan karena pekerjaan ini sudah bisa di tahu berapa pendapatan yang bisa kita dapatkan dalam sekali memulung.” (Wawancara dengan RS, 13 Februari 2016).

Hasil wawancara dengan beberapa pemulung tersebut diketahui bahwa pekerjaan memulung menjadi jalan satu-satunya bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kecenderungan ini jelas menunjukkan tidak adanya keinginan para pemulung untuk mengupayakan cara lain untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan. Mayoritas pemulung di TPA Tamangapa beranggapan bahwa tidak menjadi masalah jika hanya bekerja sebagai pemulung asalkan mereka bisa makan walaupun profesi mereka hanya sebagai pemulung. Namun yang menjadi masalah

karena pemulung cenderung tidak berpikir jangka panjang untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik terlebih memikirkan pendidikan anak-anak mereka:

“Saya tidak pernah sekolah, kakak saya ji yang sekolah itupun sampai tamat SMP saja. Mau bagaimana lagi kita ini kan orang susah, tidak ada uang bayar sekolah, hasil jual sampah itu kan cuma bisa beli makanan hari-hari, tidak cukup bayar kebutuhan lain. Makanya anak-anak di sini itu banyak tidak sekolah karena orang tuanya lebih mau anaknya bekerja juga cari uang (Wawancara dengan M pada tanggal 14 Februari 2016)”.

Keterangan informan di atas mengindikasikan bahwa dampak lemahnya pendidikan juga berpengaruh pada anak-anak pemulung di TPA Tamangapa. Karena pemulung harus bersaing dengan kerasnya kehidupan di kota Makassar, mereka cenderung tidak memikirkan lagi masa depan anak-anaknya. Hal ini lagi-lagi karena keterbatasan dana yang dimiliki, mereka tidak mampu membayar uang sekolah. Para orang tua pemulung masih enggan memasukkan anak-anaknya di sekolah, karena menganggap akan mengganggu mereka untuk bekerja.

Sejauh hasil pengamatan yang telah dilakukan peneliti, komunitas Format tidak menjelaskan tentang adanya upaya pemberdayaan para orang tua pemulung dengan memberikan pengarahan dan pengertian mengenai hak-hak anak khususnya mengenyam pendidikan sebagaimana amanat negara, mereka cenderung tidak mengerti dan membiarkan anak-anaknya tidak sekolah tetapi justru melibatkan anak-anak dalam pekerjaan yang beresiko tersebut.

Melihat realitas ini sudah sepatutnya pemerintah mengambil langkah progresif untuk mengentaskan persoalan kurangnya akses

pendidikan bagi orang tua dan anak-anak pemulung yang faktanya dinyatakan informan pemulung banyak terkendala biaya pendidikan. Dalam konteks ini juga tidak dikecualikan komunitas Format yang eksistensinya sebagai organisasi pemberdayaan berbasis sumber daya atau partisipasi masyarakat (*Community Based Development*) sebenarnya mampu membuat program pemberdayaan di bidang pendidikan.

Pemberdayaan pemulung melalui pendidikan ini bisa memberikan warna tersendiri bagi pemulung di TPA Tamangapa, untuk menyesuaikan diri pada era globalisasi sekarang ini yang kian menyulitkan kondisi masyarakat miskin. Bagi para pemulung di TPA Tamangapa, pemberdayaan melalui pendidikan menjadi hal positif karena dapat mendorong mereka untuk berfikir lebih maju dan dapat menambah wawasan baik dalam hal budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan.

Tindakan yang lebih konkrit misalnya komunitas Format memberdayakan anak-anak pemulung melalui pelayanan pendidikan, yaitu dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang tentunya membutuhkan kemitraan dengan lembaga pendidikan atau melibatkan pihak kampus dan mahasiswa dengan program pengabdian masyarakatnya. Sebagaimana diketahui pendidikan bagi pemulung tidak selalu harus berlangsung di suatu lembaga pendidikan formal tetapi juga dapat dilaksanakan secara informal. Sebagian dari mereka pendidikannya dapat berlangsung di lembaga atau

sekolah umum, hal ini disebabkan oleh faktor kemampuan dan ketidakmampuan anak pemulung itu sendiri.

b. Faktor Sistem Sosial – Ekonomi

Pada aspek ini menggambarkan faktor penghambat pemberdayaan yang sifatnya lebih luas dan berbeda dengan uraian sebelumnya yang bersifat individual atau hanya di lingkungan keluarga pemulung di TPA Tamangapa. Dalam hal ini faktor penghambat pemberdayaan juga terjadi pada sistem sosial masyarakat terutama di sektor ekonomi. Paradigma masyarakat cenderung berasumsi bahwa perkembangan kota Makassar menjanjikan pekerjaan dan penghidupan yang layak, maka konsekuensinya terjadi peningkatan penduduk akibat perpindahan sebagian masyarakat pedesaan ke kota Makassar.

Namun demikian, khususnya pemulung yang mayoritas kurang berpendidikan dan dominan berasal dari desa di luar Makassar, justru menambah tingkat kemiskinan yang diakibatkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan strata pendidikan mereka sehingga profesi sebagai pemulung mereka lakukan.

Upaya pemberdayaan yang telah dilakukan oleh komunitas Format untuk meningkatkan pendapatan pemulung di TPA Tamangapa, juga mengalami suatu hambatan karena sistem sosial-ekonomi di Makassar kurang mendukung potensi sumberdaya masyarakat miskin. Dari hasil wawancara dengan komunitas Format, misalnya menyatakan bahwa

sebagian pemulung kurang meningkat pendapatannya karena pihak-pihak pemodal kurang mengapresiasi kinerja pemulung:

”Pemulung di TPA Tamangapa sangat perlu kita perhatikan karena melihat kondisi mereka saat ini sangat memperhatikan yang diakibatkan pendapatan yang mereka dapatakan kurang cukup untuk menafkahi keluarga mereka yang di akibatkan harga barang hasil mulung. Mereka itu hanya dihargai perkilonya Rp 900 rupiah kepada penada barang mereka. Masalah ini terkait kurangnya dukungan kemitraan dari pihak atau lembaga lain (Wawancara dengan RT pada tanggal 13 Januari 2016)

Berdasarkan keterangan informan di atas, diketahui bahwa keadaan ekonomi keluarga pemulung di TPA Tamangapa sangatlah memprihatinkan mengingat pendapatan mereka sangat kecil sehingga tingkat kemakmuran dan kesejahteraan mereka belum tercapai. Permasalahan ini tentunya berkaitan dengan kesediaan pemerintah, LSM, dan semua pihak pengusaha yang diharapkan mampu memberikan bantuan meskipun hanya berupa akses kerjasama atau kemitraan agar terjadi peluang bagi pemulung untuk berwirausaha.

Keadaan ekonomi pemulung sangat erat kaitannya dengan tingkat kemakmuran dan tingkat kesejahteraan. Dalam hasil penelitian ini belum ditemukan suatu elemen masyarakat baik organisasi swasta maupun pemerintah yang benar-benar mampu memicu peningkatan ekonomi pemulung yang sangat menentukan kebutuhan hidup keluarganya. Dari hasil wawancara kepada pemulung, terungkap bahwa segi pendapatan mereka perhari dalam menafkahi kebutuhan keluarga sangat minim.

Adapun penghasilan masyarakat pemulung per individu di TPA Tamangapa misalnya pendapatan perhari Rasniar Rp.900 dan per kilo

40, pendapatan perhari Sudirman Rp.900 dan perkilo 50, pendapatan perhari Mantan Rp.900 dan perkilo 40, dan pendapatan perhari Jumariah Rp.900 dan perkilo 40. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pekerjaan sebagai pemulung merupakan suatu pekerjaan yang memiliki pendapatan yang sangat kecil meskipun pekerjaan ini bisa memberikan uang setiap harinya. Menurut pengakuan salah satu pemulung mengatakan bahwa :

“Setiap hari saya bekerja dan bisa mendapatkan uang sekitar Rp. 900 perkilonya untuk semua barang termasuk botol-botol bekas, plastik dan barang bekas lainnya itu seperti besi, aluminium serta barang-barang peralatan masak rumah tangga yang tidak terpakai lagi maka benda itu bisa menghasilkan uang yang banyak karena barang itu masih mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. (Wawancara dengan JH, 14 Februari 2016).

Demikian halnya dengan pemulung lain di TPA Tamangapa, pendapatan harian hanya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga sebagian pemulung berinisiatif mencari pekerjaan tambahan karena tidak sanggup meminjam uang diakibatkan ketidaksanggupan untuk membayar pinjaman setiap bulannya. Oleh sebab itu pemulung di TPA Tamangapa mayoritasnya cenderung bergelut pada profesi pemulung sedangkan sebagian kecil saja yang mencari pekerjaan tambahan.

Ironisnya karena pekerjaan pemulung tersebut justru melibatkan anak-anaknya sehingga berdampak pada perkembangan pendidikan anak. Padahal seperti yang diketahui, mempekerjakan anak mempunyai aturan sendiri yang intinya tidak diperbolehkan pada usia kanak-kanak. Fenomena ini begitu nyata ditemukan ditemukan peneliti di TPA

Tamangapa. Anak-anak yang tidak bersekolah ataupun yang bersekolah sering membantu orang tuanya untuk bekerja sebagai pemulung dengan mengumpulkan barang bekas yang mereka dapatkan kemudian mereka satukan dengan barang hasil mulung orang tuanya.

Hal ini terjadi misalnya pada seorang pemulung di TPA Tamangapa. Hasil mulung yang didapatkan oleh Mantan dan anaknya mereka jual kepada pengepul untuk kebutuhan keluarga dan kebutuhan sekolah untuk anak-anaknya. Walaupun pekerjaan ini serba berkecukupan tetapi Mantan selalu bekerja keras untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai jejang tingkat SMA. Mantan sebagai pemulung tetap berharap dengan menyekolahkan anak-anaknya dapat memperbaiki kualitas keluarga dengan melalui pendidikan karena dia sendiri hanya mengenyam pendidikan sampai jejang Sekolah Dasar.

Demikian halnya terjadi pada pemulung lain, Sudirman yang selalu berupaya mengelolah hasil mulung yang dia dapatkan dengan cara yang hampir sama dilakukan oleh Mantan yang dibantu oleh anak-anaknya dengan cara mengumpulkan barang tersebut yang didapatkan selama 1 minggu kemudian baru menjualnya. Hal ini bermaksud agar mereka bisa mendapatkan uang yang lebih banyak.

Pola kehidupan pemulung seperti yang diuraikan sebelumnya seakan menjadi siklus yang tetap di tempatnya atau tidak menunjukkan perubahan. Pemulung lebih memilih mengelola sampah misalnya yang dilakukan oleh pak Sudirman, yakni memilah sampah atau barang yang

dianggap bernilai mahal kemudian menyimpan barang tersebut di rumahnya. Kemudian hari pemulung menjual barang tersebut pada saat barang mengalami kenaikan harga dan walaupun harga barang turun seperti yang terjadi sekarang ini yaitu harga barang mengalami penurunan yang di akibatkan krisis ekonomi sehingga barang pemulung yang awalnya di harga Rp.1.500 perkilo sekarang dihargai hanya Rp.900 saja.

Himpitan ekonomi ternyata tidak mendorong para pemulung untuk membuat perubahan pada dirinya untuk mencari sumber-sumber pendapatan lain atau minimal menerapkan strategi pengembangan usaha memulung. Berbeda halnya dengan sebagian pemulung yang tidak putus akal berupaya mendapatkan uang sangat besar dengan cara menyimpan barang yang kualitasnya yang sangat tinggi dari pada barang lain sehingga pada saat harga barang sudah mengalami kestabilan dia bisa menjual kembali barang tersebut. Tindakan pemulung seperti ini karena menyadari pentingnya keidupan keluarganya dan anak-anaknya yang masih sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara beberapa pemulung di TPA Tamangapa mereka mengaku pendapatan yang mereka dapat semata-mata hanya kebutuhan hidup mereka termasuk pendidikan anak-anaknya yang bertujuan memperbaiki nasib keluarga mereka karena selama ini pendapatan mereka hanya hidup serba terbatas sehingga komunitas pemulung melakukan peran aktif dalam memperbaiki kondisi pemulung yang di akibatkan turunnya harga barang yang diakibatkan turunnya prekonomian Indonesia.

c. Kebijakan Pemerintah

Selain faktor individual pemulung dan sistem ekonomi yang berlaku di masyarakat Makassar, faktor penghambat lainnya juga terkait dengan kebijakan dan program pemerintah yang kurang bersinergi dengan program pemberdayaan yang dikelola oleh swadaya masyarakat. Hasil pengamatan di TPA Tamangapa dan wawancara dengan pihak komunitas Format, mengindikasikan bahwa kurangnya sinergitas antara pemerintah kota Makassar dengan LSM, stakeholder, tokoh masyarakat setempat dan terutama komunitas Format yang seakan-akan berjalan sendiri untuk memberdayakan pemulung di TPA Tamangapa.

Kurangnya koordinasi pemerintah dengan komunitas Format yang eksis di TPA Tamangapa misalnya ditunjukkan dengan kritikan yang selalu diterima oleh komunitas ini dari pihak UPTD. Adanya nuansa saling menyalahkan ini diindikasikan dari pernyataan Kepala UPTD Tamangapa saat diwawancarai mengatakan bahwa ;

“Hal ini tentunya sangat menghambat proses kerja truk sampah yang masuk ke dalam UPTD sehingga mengalami kemacetan di daerah tersebut karena aktifitas pemulung didalamnya tidak bisa dikontrol dan salah satunya barang-barang hasil mengepul pemulung mereka simpan sembarang tempat sehingga terjadi suatu penghambatan di dalam UPTD”(Wawancara dengan SS, 20 Januari 2016)”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa untuk mengentaskan permasalahan yang terjadi saat ini, bukan hanya bertumpu pada kinerja komunitas Format melainkan sangat dibutuhkan peranan pemerintah setempat dalam menangani hal-hal yang menghambat

jalan masuknya truk sampah di lokasi UPTD yaitu banyak barang-barang pemulung yang menaruh barangnya di jalan masuknya truk sampah dan traktor yang mengatur sampah agar tidak berserakan. Dalam hal ini pemerintah perlu berkoordinasi dengan komunitas Format dalam hal pemberdayaan bagi pemulung agar bisa mengatur barang hasil mulungnya bisa diatur sehingga tidak mengganggu arus jalan truk sampah dan traktor sampah yang sedang bekerja. Hal senada juga di ungkapkan oleh Kepala Kelurahan Tamangapa mengemukakan bahwa;

“Volume sampah di Makassar tahun 2013 mencapai 500-550 ton atau sekitar 4.000 meter kubik per hari. Dan jika musim buah, volume sampah lebih tinggi bisa mencapai dua kali lipat. Sampah paling banyak disumbang oleh daerah penduduk tinggi yakni kecamatan Rappocini, Tallo, Bantoloa, dan Tamalanrea. Data terakhir volume sampah tahun 2015 mencapai 800 ton per hari, Tetapi dengan adanya komunitas pemulung di daerah TPA yang diberdayakan oleh Format itu sangat membantu mengurangi sampah yang masuk walaupun tidak sebanding dengan pemasukan sampah di UPTD.” (Wawancara dengan HA, 21 Januari 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa perlunya pemerintah setempat berkoordinasi dengan komunitas Format untuk bersinergi melakukan pemberdayaan terhadap pemulung di TPA Tamangapa agar kegiatan pemulung dapat terorganisir secara baik sehingga permasalahan pengelolaan sampah di TPA Tamangapa dapat berjalan lancar. Selain itu perilaku pemulung yang cenderung tidak memperhatikan kondisi lingkungan karena barang hasil mulung mereka berserakan di pinggir jalan, juga dapat ditangani sehingga proses masuknya truk sampah dapat berjalan dengan lancar tanpa membuat kondisi kemacetan di jalan umum daerah TPA Tamangapa. Mengenai hal ini

diungkapkan oleh salah seorang pemulung yang bekerja di TPA Tamangapa beliau menyampaikan bahwa :

“Kami menyadari barang yang kami kumpulkan memang sangat mengganggu masuknya truk sampah yang datang dari kota tapi kami lakukan itu karna dimana lagi kami dapat menyimpan barang yang barang hasil mulung sedangkan tempat tersebut sudah berbentuk gunung jadi jalan satu-satunya kami menyimpan barang kami di tempat yang kosong” (Wawancara dengan M, 14 Februari 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas terlihat bahwa kondisi TPA sekarang ini sudah dipadati dengan sampah yang mengunung sehingga aktifitas masuknya truk di tempat penampungan sangat terganggu diakibatkan tidak adanya lahan yang cukup lagi untuk menampung sampah tersebut, termasuk hasil barang dari para pemulung yang mereka kumpulkan dalam suatu wadah penyimpanan dan kemudian barang tersebut mereka simpan di pinggir jalan di daerah lewatnya kendaraan truk sampah.

Bagi komunitas Format dalam menghadapi sejumlah masalah yang menghambat proses pemberdayaan, mengungkapkan bahwa mereka juga terkendala minimnya dana yang tersedia, sehingga sulit untuk mengembangkan program-program lain dan fasilitas yang belum memadai untuk melakukan pemberdayaan secara menyeluruh terhadap pemulung di TPA Tamangapa. Selain itu tidak adanya tenaga ahli pendamping dari pemerintah kota Makassar, sehingga jika program pemberdayaan lainnya ditambahkan dengan kegiatan baru misalnya pelatihan kependidikan,

keterampilan menjahit, otomotif, dan wirausaha maka akan membutuhkan dana untuk operasional pendamping.

D. Hasil Pemberdayaan pemulung

Hasil pemberdayaan pemulung dapat di ketahui bahwa dengan adanya program yang dibuat oleh forum masyarakat terpinggirkan yang menunjang di harapkan menunjang pendapatan hasil yang baik. Pemberdayaan pemulung melalui forum masyarakat terpinggirkan (FORMAT) dapat memberikan titik terang dalam permasalahan pendapatata dari hasil barang yang kumpulkan oleh pemulung.

Pemberdayaan pemulung melalui rogram yang dibuat oleh FORMAT yaitu memberikan penyuluhan kepada pemulung dalam proses menggolongkan sampah kering dan basah karena dua barang-barang tersebut mempunyai nilai ekonomi tersendiri sehingga pemulung dapat pengetahuan dan keterampilan dalam mendaur ulang salah satu sampah basah yang jarang kumpulkan pada hal sampah tersebut dapat bernilai ekonomi walaupun pendapatannya tidak terlalu besar tetapi dalam bidang lingkuran itu sudah mengurangi pencemaran udara dan dalam bidang ekonomi penghasilan pemulugn yang awalnya Rp. 900 perkilonya sekarag Rp 1300 perkilonya.

E. Pembahasan

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka dapat diketahui bahwa pemberdayaan pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa Antang Kota Makassar yang meliputi keadaan sosial dan pemberdayaan masyarakat yaitu bahwa kehidupan manusia sebagai makhluk

sosial, sebagai makhluk sosial manusia memiliki kecenderungan untuk berhubungan dengan seseorang dalam rangka mewujudkan kebutuhan-kebutuhan yang di perlukannya, baik untuk kepentingan pribadinya maupun kepentingan orang lain. arti Masyarakat sebagai suatu sistem dari cara kerja dan prosedur, otoritas dan saling bantu-membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial, sistem pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan. Sistem yang kompleks dan selalu berubah dari relasi sosial (Mack Ever : 90).

Manusia dalam masyarakat sosial, baik berinteraksi secara individu maupun secara kelompok. Demikian juga dengan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat pemulung di TPA Tamagapa yang selalu menempatkan kepentingan pribadinya dengan bekerja untuk keluarga mereka. Setiap harinya mereka lakukan pekerjaan ini tanpa ada rasa lelah di dalam pekerjaan mereka meskipun keadaan ekonomi para pemulung ini pas-pasan tetapi mereka beranggapan bahwa pekerjaan ini merupakan suatu mata pencarian mereka yang sangat mereka handalkan walaupun tidak sebanding dengan pendapatan pekerjaan kantoran yang memiliki jam istirahat tertentu dan memiliki pendapatan tetap setiap bulannya sedangkan masyarakat pemulung mereka bekerja setiap harinya dari pagi sampai malam untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka dan penghasilan mereka dibawah rata-rata. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Aristoteles bahwa manusia merupakan makhluk zoon politicon yaitu manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lain untuk untuk bekerja sama dalam

mencapai suatu tujuan tersebut. Di TPA Tamangapa ini selain sebagai laha tempat pembuangan sampah dan aktifitas kerja pemulung ada kegiatan lain juga yang meliputi kegiatan baca tulis alqur'an buat anak-anak pemulung dan sekolah Gratis buat para pemulung yang kurang mampu. Kegiatan ini bermaksudkan untuk mengajar para anak-anak bahwa pendidikan itu sangat penting dan tidak terlepas juga dengan pembelajaran agama kepada anak-anak pemulung karna bukan ilmu saja kita tapi akhlak juga perlu di ajarkan agar suatu saat nanti bukan ilmu saja mereka andalkan tetapi moral juga harus mereka miliki karna generasi bangsa ini berada di tangan yang anak bangsa.

Mengenai status sosial para pemulung ini, secara umum mereka berada di kelas bawah hampir sama dengan para pengamen yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata perharinya. Di dalam permasalahan sosial para pemulung yaitu jenis sosial yang di dasarkan pada setiap usaha –usaha dan barang-barang yang di dapatkan oleh para pemulung yang bisa menghasilkan pendapat mereka dari barang yang mereka kumpulkan, barang yang sering di dapatkan yaitu berjenis barang yang berbentuk besi, plastik dan botol-botol yang bisa menghasilkan uang. Tetapi mereka hanya sering mendapatkan barang dalam bentuk plastic dan botol saja. Pendapatan jenis ini selalu mendapatkan suatu permasalahan bagi pemulung harga tersebut di hargai sangat rendah sehingga para pemulung mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluar mereka.

Mengenai keadaan ekonomi para pemulung dapat dijelaskan bahwa penghasilan yang mereka peroleh setiap harinya tidak memadai untuk

memenuhi kebutuhan minimum (dasar) karena tingkat pendapatan yang kecil, situasi serba kekurangan yang terjadi semata-mata bukan kehendak para pemulung ini melainkan karena kekuatan yang tidak mereka miliki untuk melawan situasi ini seperti ini, hal ini ditandai dengan lemahnya nilai tukar hasil produksi orang miskin, rendahnya sumber daya manusia, rendahnya produktivitas, terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pendapatan dan terbatasnya kesempatan untuk pembangunan (BAPPENNAS 2000:2). Ketidak sanggupannya mereka untuk memenuhi sehari-harinya menyebabkan mereka berada di standar tingkat hidup yang rendah dibandingkan dengan standar tingkat kehidupan yang umum. Masyarakat pemulung pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah yang cukup, modal atau keterampilan karena faktor produksi yang dimiliki sedikit sekali maka menyebabkan kemampuan mereka sangat terbatas dalam memperoleh pendapatan. Selain itu tingkat pendidikan yang rendah rendah yaitu tingkat sampai tamatan Sekolah Dasar bahkan tidak pernah sekolah dikarenakan tidak biaya, karena waktu tersita habis untuk membantu orang tua dalam mencari tambahan penghasilan akan membuat mereka turun temurun selalu terjatuh dalam keterbelakangan dibawah garis kemiskinan.

Keadaan ekonomi keluarga sangat erat kaitannya dengan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan hal ini karena tingkat ekonomi keluarga sangat menentukan kemampuan keluarga untuk memenuhi segala kebutuhannya. Keadaan ekonomi keluarga sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapat seseorang, dimana semakin tinggi tingkat pendapat yang diperoleh seseorang

maka semakin tinggi pula tingkat kemakmuran dan kesejahteraan keluarga (Kaslan, 2001: 167).

Demikian juga dengan keadaan ekonomi para pemulung di TPA Tamangapa ini, karena keterbatasan faktor produksi yang dimiliki seperti tanah, uang, pendidikan, keterampilan dan keahlian yang membuat mereka kesulitan pula dalam memperoleh pendapatan yang maksimal. Rendahnya tingkat pendapatan yang mereka peroleh menyebabkan rendahnya standar hidup mereka yaitu bahwa mereka tidak mampu memenuhi segala kebutuhan hidupnya termasuk untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka.

Ketidakmampuan para pemulung dalam meningkatkan pendapatan mereka berakibat pula terhadap tingkat kemakmuran dan kesejahteraan keluarga pemulung, hal ini ditandai dengan ketidak mampuan pemerintah setempat dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dilapangan akibat krisis ekonomi Indonesia sehingga bantuan dari pemerintah setempat hanya bisa melayani masyarakat miskin yang memiliki di kantor kelurahan masalaha kependudukan. Sedangkan untuk pemberdayaan pemlung dari segi ekonomi pemerintah hanya bisa menyediakan lahan untuk pemulung atau masyarakat miskin bank sampah yang di program oleh pemerintahan kota Makassar yang dapat menukarkan barangnya dengan uang atau beras. Pemerintah kelurahan juga mengatur para pemulung agar dapat menyimpan barang hasil mulng mereka tidak sembarang tempat agar tidak mengganggu arus jalan yang sering dilewati kendaraan pribadi masyarakat yang biasa melewati tempat itu, kemampuan pemerintah setempat hanya bisa membantu sampai disitu saja.

Begitu pula dengan UPTD Tamangapa yang bisa membantu masyarakat pemulung untuk membiarkan pemulung mencari nafkah dari sampah-sampah yang masuk di UPTD dikarenakan pihak UPTD lebih mengfokuskan sampah yang masuk di TPA Tamangapa akibat makin meningkatnya pusat penjualan yang produksi penjualan makin meningkat termasuk penjualan yang mengandung sampah sehingga dari pihak sangat kualahan mengatur sampah yang masuk. Jadi partisipasi pihak UPTD hanya sampai dengan memperbolehkan pemulung mengaris rezeky di lokasi TPA Tamangapa. Permasalahan yang terjadi TPA Tamangapa terhadap nasib para masyarakat pemulung tak lepas dari peran seseorang atau kelompok yang peduli nasib para kaum pemulung yang dilihat bahwa mereka sangat perlu dibantu.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pemberdayaan Pemulung di tempat Pembuangan akhir (TPA) Tamangapa Antang Kota Makassar, maka dapat di simpulkan bahwa :

1. Proses pemberdayaan pemulung pemulung di TPA Tamangapa Kota Makassar adalah sebagai berikut
 - a. Peran Format sebagai *Commnity Based Development* yakni melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan membentuk suatu kelompok yang bertujuan meningkatkan kapasitas SDM pemulung itu sendiri dalam pengetahuan tentang metode pengelolaan sampah yang mereka kumpulkan menjadi bernilai ekonomi. Selain itu komunitas ini adalah berupaya membangun kesadaran pemulung agar dapat hidup mandiri terutama menghadapi problem kemiskinan dan keterbelakangan. Kemiskinan pada komunitas pemulung di TPA Tamangapa dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum layak baik itu pangan, pakaian, papan, kesehatan dan pendidikan.
 - b. Kegiatan pemulung di TPA Tamangapa adalah para pemulung mengumpulkan sampah secara individu maupun kelompok yang telah di bongkar truk sampah. Para relawan format memberikan bimbingan khusus kepada pemulung dalam pengelolaan sampah yang mereka kumpulkan sehingga jenis barang yang mereka kumpulkan dapat bernilai tinggi.

2. Faktor Pendukung Pemberdayaan Pemulung Dalam Pengelolaan Sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar adalah terlaksananya pemberdayaan pemulung berbasis swadaya masyarakat atau disebut Community Based Development (CBD). Adapun yang dimaksud bentuk nyata pemberdayaan pemulung yang dilakukan oleh Format adalah bimbingan atau penyuluhan kepada anggota pemulung yang tergabung dalam komunitas ini. Selain itu pemulung di TPA Tamangapa juga dibekali dengan keterampilan teknis pengolahan sampah. Sedangkan yang penghambat adalah faktor individual. Dalam hal ini kurangnya kesadaran pemulung di TPA Tamangapa untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan mereka sehingga pola kehidupan dan penghasilan ekonomi mereka juga stagnan atau tidak berkembang. Adapun aspek yang menggambarkan faktor penghambat pemberdayaan yang sifatnya lebih luas dan berbeda dengan yang bersifat individual atau hanya di lingkungan keluarga pemulung di TPA Tamangapa. Dalam hal tersebut faktor penghambat pemberdayaan juga terjadi pada sistem sosial masyarakat terutama di sektor ekonomi. Sehingga pemberdayaan tersebut mengalami suatu hambatan karena sistem sosial –ekonomi di Makassar kurang mendukung potensi sumber daya misalnya pihak-pihak pemodal kurang mengapresiasi kinerja pemulung

B. Saran

Setelah mengadakan penelitian ini, maka penulis mencoba memberikan saran yang di harapkan dapat bermanfaat dalam hal

pemberdayaan pemberdayaan pemulung di tempat pembuangan akhir (TPA)
Tamangapa kota Makassar.

1. Para pemulung hendaknya bersikap jujur dalam bekerja (dalam memunguti sampah adalah barang-barang yang memang sudah dibuang, tidak mengambil barang yang bukan menjadi haknya) sehingga hal ini akan menciptakan persepsi yang baik kepada warga.
2. Pemerintah hendaknya selalu meninjau dan terjun langsung untuk melihat kondisi masyarakatnya sehingga dapat memberikan bantuan kepada warganya, seperti bantuan yang berupa penyuluhan-penyuluhan, memberikan pembinaan keterampilan, pendampingan dan pemodalan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

BEM STIKES Mega Rezky, 2012, *Menakar Limbah Kota*, Makassar: Kedai Buku Jenny.

Risyanti Riza, .H. Roesmidi, .2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang : ALQAPRINT JATINANGOR

Edi Suharto. 2008:13 “*Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik : Peran pembagunan Sejahteraan social dan pekerjaan social dalam mewujudkan Negara kesejahteraan (Welfare State) di Indonesia*, Alfabeta: bandung.

Edi, Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Fathoni. 2005. *Format-format Penelitian social*. Jakarta PT Grafindo Persada

Jim dan Frank Tesoriero. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Griffin, W. Ricky, 2004, *Manajemen*, Jakarta:Erlangga

Handyaningrat, Soewarno, 2002, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta : Haji Masagung.

Hidayat,s. 2001. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: sebuah rekonstruksi CBD*.PT. Pustaka Quantum, Jakarta.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2003, *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI), Buku I : Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara*, Jakarta:Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2006, *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI), Buku III : Landasan dan Pedoman Pokok Penyelenggaraan Sistem Administrasi Negara*, Jakarta:Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.

Merriam Webster (2000:1) *Analisis mewujudkan desentralisasi dan Otonomi Daerah* . Jakarta. Gramedia Putaka Utama.

Robinson (2007) *Community Development in Perspective*. Ames: Iowa State University Press

Sabardi, Agus, 2008, *Manajemen Pengantar*, Yogyakarta:UUP STIM YKPN

Sa'id. E.G, 2011. *Wawasan Tantangann, dan peluang Agrotechnopreneur Indonesia*: IPB Press., Bogir.

Satori, Djam'an, dan Komariah, Aan, 2013, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung:Alfabeta

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung.

Suhartono,E. 2011. *Pemberdayaan rakyat. Ceramah diklat PIM II LAN*, Jakarta.

Sukardi. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Sunyoto Usman, 2004. *"pembangunanan dan pemberdayaan masyarakat"*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Taro Yamane, Rinawati, 2011. *Metode Penelitian Populasi dan sampel*. Jakarta.

Tika, P. 2008. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara

Alamat Web :

Setivanaya, 2011, "Pemerataan Ekonomi" Arsip blog, Jakarta pada 03 Maret 2011
<http://setivayana.blogspot.com/2011/03/pemerataan-ekonomi.html>

Strategi Menghadapi Globalisa

Edi Suharto, 2004, "Pendekatan Pekerjaan Sosial Dalam pekerjaan Masyaakat Miskin" Modul, Malang Pada 12 April 2004
http://www.policy.hu./suharto/modul_a/makindo_30.html

Ania Maharani,2012, "Pemberdayaan masyarakat" Artikel, Jakarta pada 25 April 2012
<http://dkijakarta.bkkbn.go.id/Lists/Artikel/DispForm.aspx?ID=21>

Ade Yunaifah Afriyani, 2011, "Starategi Menghadapi Globalisasi Melalui Pemberdayaan Masyarakat" Artikel, Tegal pada 30 Januari 2008
<http://www.bppp-tegal.com/web/index.php/artikel/100-artikel/artikelmanajemen/394-strategi-menghadapi-globalisasi-melalui-pemberdayaan-masyarakat>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muhammad Alfian, Lahir di Ujung Pandang 03 Februari 1992 dari pasangan Syahril Ardiansyah dan Sitti Safiah, Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Penulis memulai Pendidikan di SD Impres Mangga 3 Makassar lulus pada Tahun 2004, SMPN 34 Makassar lulus pada Tahun 2017, SMAN 18 Makassar lulus pada Tahun 2010. Dan tercatat sebagai manusia Jurusan Administrasi Negara, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2010-2017. Saat kuliah, pernah aktif berorganisasi salah satunya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Prinsip yang selalu di pegang adalah **Tiada kata menyerah sebelum kita berjuang**